



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2017

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017” dapat kami selesaikan.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2017 dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Di samping itu merupakan rangkaian pelaksanaan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengemban Visi, Misi dan Tujuan Kabupaten Penajam Paser Utara. Perlu diketahui bahwa perhitungan Nilai Capaian Kinerja dan Pengukuran Evaluasi Kinerja menggunakan indikator yang terbatas dan disesuaikan dari data yang tersedia.

Di samping itu, laporan ini diharapkan dapat dipakai sebagai gambaran tentang Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan merupakan satu di antara upaya sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ini telah direviu oleh Inspektorat Kabupaten sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan laporan ini sangat kami harapkan, yang

nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan di tahun mendatang.



BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Drs. H. Yusran Aspar, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
INSPEKTORAT

Jalan Provinsi Kilometer 1 Penajam Telepon (0542) 7200413
Faksimili (0542) 7200320 E-Mail : inspektorat.ppu@gmail.com Kode Pos 76141

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun Anggaran 2017 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Berdasarkan reviu yang telah kami lakukan, setelah memberikan saran perbaikan kami dapat memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun Anggaran 2017 telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Penajam, 28 Maret 2018

Inspektur,



H. Haeran Yusni, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196202211 198503 1 011

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejak dikeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah sebagai paradigma baru.

Adanya paradigma baru tersebut membawa konsekuensi terhadap perubahan sikap, mental dan perilaku aparatur yang seluruhnya diarahkan untuk menciptakan tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi pilarnya.

Searah dengan paradigma baru tersebut, pemerintah dituntut untuk lebih terbuka serta dapat melakukan pertanggungjawaban kegiatan kepada publik. Karenanya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 yang merupakan salah satu media pertanggungjawaban kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2017. Secara garis besar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program yang kesemuanya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2018. Selanjutnya dari

RPJMD ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT Tahun 2017), serta untuk mengetahui hasilnya ditetapkan indikator kinerja sasaran.

Hasil capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan yang ditetapkan Tahun 2017 secara keseluruhan dan detail dituangkan pada lampiran Pengukuran Kinerja (PK) laporan ini. Beberapa indikator sasaran masih ada yang belum mencapai nilai baik, hal ini tentunya akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dengan cara peningkatan kinerja melalui disiplin pelaksanaan program yang telah disepakati.

Berdasarkan nilai capaian kinerja sasaran pada tahun 2017, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki nilai capaian sebesar 150,06% dalam kategori “Sangat Berhasil”. Dengan sasaran strategis sebanyak 8 sasaran dan 44 indikator kinerja.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Kedudukan dan Fungsi Organisasi	1
C. Sumber Daya Aparatur	1
D. Aspek Strategis dan Permasalahannya	3
E. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Visi dan Misi	11
B. Tujuan dan Sasaran	13
C. Indikator Kinerja, Strategi dan Arah Kebijakan	14
D. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah	18
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2016	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
B. Realisasi Anggaran	60
BAB IV PENUTUP	71
Lampiran I Perjanjian Kinerja Tahun 2017	
Lampiran II Rencana Kinerja Tahun 2017	
Lampiran III Pengukuran Kinerja 2017	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Pegawai Berdasarkan Eselon	2
Tabel I.2	Data Pegawai Berdasarkan Golongan	2
Tabel II.1	Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara	13
Tabel II.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kabupaten Penajam Paser Utara	15
Tabel II.3	Sasaran dan Program Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara	18
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	29
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017	30
Tabel III.3	Capaian APK Tahun 2014 - 2017	33
Tabel III.4	Capaian APM Tahun 2014 - 2017	34
Tabel III.5	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	41
Tabel III.6	Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2015 - 2017	45
Tabel III.7	Rasio Tenaga Kesehatan Tahun 2016 dan Tahun 2017	48
Tabel III.8	Luas Areal dan Jumlah Produksi Perkebunan Tahun 2016 dan Tahun 2017	55
Tabel III.9	Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2017	58
Tabel III.10	Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2017	58
Tabel III.11	Perolehan Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017	59
Tabel III.12	Laporan Realisasi APBD T.A 2017	61
Tabel III.13	Realisasi Anggaran Berdasarkan Program T.A 2017	65

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1	Pegawai Berdasarkan Eselon	2
Grafik I.2	Pegawai Berdasarkan Golongan	3
Grafik III.1	Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2011	30
Grafik III.2	Nilai PAD Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017	37
Grafik III.3	Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya Tahun 2014 - 2017	43
Grafik III.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 - 2016	52
Grafik III.5	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan Aktif/ Berkembang Tahun 2014 - 2017	54
Grafik III.6	Proporsi PAD pada APBD Tahun 2017	60
Grafik III.7	Proporsi Belanja pada APBD Tahun 2017	61

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

B. Kedudukan dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai kewenangan mencakup semua kewenangan pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

C. Sumber Daya Aparatur

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka perlu ditunjang oleh sumber daya aparatur yang memadai. Satu di antara 3 (tiga) kebijakan Pemerintah Provinsi dan juga kebijakan utama yang akan diterapkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, hal ini sangat penting dalam rangka meningkatkan kompetensi dan produktivitas masyarakat yang sebelum berlangsungnya otonomi daerah, masih ketinggalan dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan investasi yang tak ternilai harganya dan sangat berperan dalam kelangsungan kemajuan Kabupaten

Penajam Paser Utara khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya di masa yang akan datang.

Sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2017 berjumlah 3.980 Pegawai Negeri Sipil dengan gambaran komposisi aparatur menurut jabatan dan golongan adalah sebagai berikut :

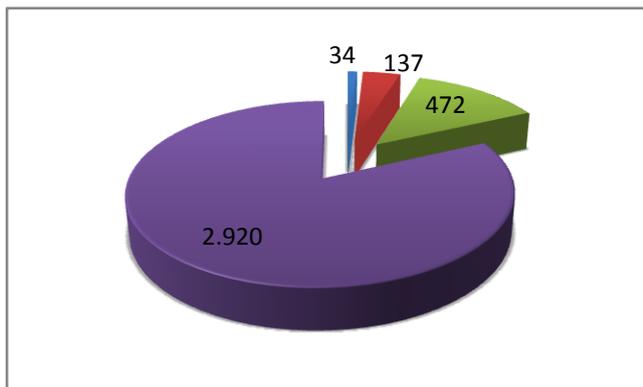
a. Berdasarkan Eselon

Tabel I.1 Data Pegawai Berdasarkan Eselon

Tingkat Eselon					
II	III	IV	V	Non Eselon	Jumlah
34	137	472	0	2.920	3.563

Sumber: Badan Kepegawaian Kabupaten Penajam Paser Utara

Grafik I.1 Pegawai Berdasarkan Eselon



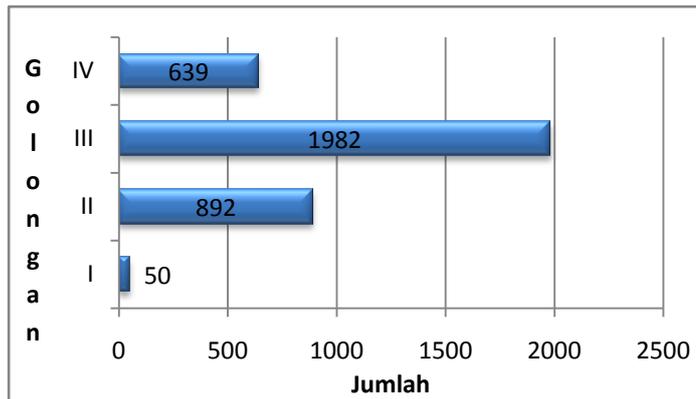
b. Berdasarkan Golongan

Tabel I.2 Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	I	50
2	II	892
3	III	1.982
4	IV	639
Jumlah		3.563

Sumber: Badan Kepegawaian Kabupaten Penajam Paser Utara

Grafik I.2 Pegawai Berdasarkan Golongan



D. Aspek Strategis dan Permasalahannya

Berdasarkan analisis masalah yang telah dilakukan, berikut identifikasi isu strategis secara internal yang ada dan dapat dikelola oleh Kabupaten Penajam Paser Utara. Isu ini harus mendapat perhatian untuk dikelola pada RPJMD yang akan datang sehingga tujuan pembangunan, visi dan misi yang dicanangkan oleh Bupati dapat dicapai dengan baik.

1. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

a. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Isu strategis pemerataan pembangunan di Penajam Paser Utara adalah ketidakmerataan pertumbuhan antar sektor. Sektor pertanian sebagai sektor yang paling penting sebagai sumber penghasilan penduduk tumbuh sangat lambat dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor pertambangan sebagai sektor yang lebih banyak menyerap tenaga kerja dari luar dengan nilai tambah yang kecil bagi penduduk setempat tumbuh dan berperan sangat besar dalam PDRB.

b. Kesejahteraan Sosial

Dari aspek kesehatan, Penajam Paser Utara memiliki kinerja yang cukup baik, namun dari segi pendidikan wilayah Penajam Paser Utara kinerjanya masih berada di bawah rata-rata Kalimantan Timur. Berbagai

problem pendidikan menjadi penyebabnya (lihat pada isu strategis pendidikan dan kesehatan).

c. Seni Budaya dan Olah raga

Kinerja olah raga belum optimal karena kurang terintegrasinya program dan penyediaan sarana untuk peningkatan prestasi olah raga. Pada aspek budaya kinerjanya memang cukup baik, namun demikian kinerja budaya itu masih dapat ditingkatkan untuk mendukung pengembangan aspek lain, misalnya pariwisata.

2. Pelayanan Umum

a. Urusan Pendidikan

Tingkat pendidikan di Penajam Paser Utara cukup baik, namun belum merata pada seluruh wilayah. Ketidakmerataan kinerja pendidikan itu terjadi karena persoalan akses yang tidak merata. Akses yang kurang merata dari sisi pemerintah disebabkan oleh kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan yang tidak merata. Pada sisi lain keterisolasian dan kemiskinan membuat masyarakat kurang memahami arti penting pendidikan.

b. Urusan Kesehatan

Setara dengan pendidikan, bidang kesehatan juga berhadapan dengan tidak meratanya kinerja kesehatan di seluruh wilayah. Ketidakmerataan ini juga disebabkan oleh sarana kesehatan yang belum memadai, jumlah dan kualifikasi tenaga paramedis yang belum memenuhi standar. Serta perilaku masyarakat yang kurang paham akan pentingnya budaya hidup sehat. Kembali akses masyarakat menjadi masalah juga untuk kesehatan.

c. Urusan Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan cenderung mengalami penurunan. Dua aspek penting menjadi penyebabnya yakni ketidaktaatan pelaku usaha terhadap ijin yang telah diberikan dan pemberian ijin yang tidak sesuai dengan

peruntukannya. Kedua masalah ini teridentifikasi disebabkan oleh lemahnya kedudukan lembaga yang bertanggung jawab terhadap aspek lingkungan hidup.

d. Urusan Pelayanan

Secara umum kualitas pelayanan di Kabupaten Penajam Paser Utara masih perlu perbaikan. Mekanisme koordinasi yang tidak baik (ego sektoral), pola pikir aparat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kurang memahami makna penting pelayanan adalah aspek penting yang ditemukan pada sisi penyedia layanan. Pada sisi pengguna layanan juga terdapat pengetahuan yang kurang bahwa mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan prima. Dua aspek ini menjadi lebih terasa karena ditambah dengan kurang tersedianya sistem dan sarana pelayanan yang memadai.

e. Urusan Sosial

Jumlah PMKS dirasakan terus meningkat. Isu ini berawal dari tidak adanya atau tidak tersedianya data yang memadai tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Data yang tidak tersedia itu diperberat dengan tidak adanya koordinasi antar instansi yang berkaitan dengan pembinaan PMKS. Selanjutnya pembinaan yang dilakukan pun tingkat keberlanjutannya masih rendah. Selanjutnya masalah ini menjadi semakin kompleks ketika sumber daya manusia pengelolanya kurang memahami makna penting dari pembinaan PMKS.

f. Urusan UMKM dan Koperasi, Industri dan Perdagangan

Industri pengolahan yang berkembang hanya satu yakni pengolahan sawit menjadi CPO, sementara industri pengolahan yang berbasis rakyat seperti UMKM dan koperasi hampir tidak berkembang. Kondisi ini jika tidak diatasi akan menjadi pisau bermata dua yang merugikan. Di satu sisi industri CPO itu *monopsoni* (menguasai penerimaan pasokan sebagai pembeli tunggal) terhadap petani sawit, pada sisi lain nilai tambah sawit tidak dinikmati oleh penduduk Penajam Paser Utara. Sementara potensi UMKM dan koperasi yang sangat besar hampir tidak tersentuh oleh program pembangunan.

Setara dengan industri, perdagangan di Penajam Paser Utara juga diwarnai oleh perdagangan besar yang memperdagangkan barang dengan nilai tambah kecil bagi Penajam Paser Utara, seperti CPO, minyak bumi dan batu bara.

Dengan demikian sejalan dengan isu pemerataan, untuk industri, perdagangan, UMKM dan koperasi terdeteksi isu strategis ketimpangan antar pelaku usaha.

g. Urusan Pertanian

Penurunan produktivitas tanaman pangan (padi) merupakan isu strategis yang harus mendapat perhatian di masa datang. Urusan ini bukan semata-mata hanya tugas Dinas Pertanian untuk meningkatkan produktivitasnya sendirian, tetapi secara komprehensif harus didukung sektor teknis terkait lainnya.

h. Urusan Perkebunan

Terdapat setidaknya 5 komoditi sangat penting dan potensial di Penajam Paser Utara, namun hanya karet dan sawit yang kinerjanya baik, sementara kopi, lada dan kelapa memiliki kinerja yang kurang menggemblirakan. Isu pemasaran dan pengolahan pasca panen menjadi penyebab buruknya kinerja sektor perkebunan, padahal dari sektor inilah sebagian besar penduduk Penajam Paser Utara hidup dan bergantung. Dengan demikian isu strategis bidang perkebunan adalah adanya ketimpangan pertumbuhan sub sektor yang sangat penting bagi penduduk ini.

i. Urusan Kehutanan

Isu strategis sektor kehutanan berkisar pada kecepatan perluasan areal lahan kritis sehingga program dan kebijakan rehabilitasi yang dilakukan tidak dapat *menutup* lahan kritis yang ada. Alih fungsi lahan, pembalakan dan minimnya keterlibatan penduduk sekitar hutan, teridentifikasi menjadi penyebabnya.

j. Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi ikan di Penajam Paser Utara cukup baik, namun demikian nilai tambahnya belum dapat dinikmati oleh penduduk Penajam Paser Utara.

Sebagian besar produksi ikan dari Penajam Paser Utara langsung dikirim dalam keadaan tanpa diolah ke wilayah lain. Perikanan merupakan potensi besar untuk dikembangkan dan ditingkatkan nilai tambahnya. Untuk itu maka kebijakan industri pengolahan ikan menjadi isu yang sangat strategis terkait dengan perikanan.

3. Daya Saing

Daya saing Penajam Paser Utara cukup baik dibandingkan dengan kabupaten lain di Propinsi Kaltim, namun demikian daya saing itu lebih berkaitan dengan sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Kedua sektor tersebut lebih banyak membawa nilai tambah bagi mereka yang berada di luar Penajam Paser Utara sebab keduanya keluar dari Penajam Paser Utara dalam bentuk mentah.

Untuk itu sangat penting untuk dikembangkan potensi daya saing yang berdasar pada lokalitas dan membawa nilai tambah bagi penduduk Penajam Paser Utara.

a. Input

Lemahnya pengelolaan industri pertanian membuat produk pertanian kurang memiliki nilai tambah, sehingga masyarakat tidak memiliki insentif untuk mengembangkan sektor pertanian yang sesungguhnya sangat potensial di Penajam Paser Utara. Kelemahan ini diperburuk dengan kualitas SDM di sektor pertanian yang relatif rendah dengan tingkat ketergantungan yang tinggi.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana jalan cukup tersedia, namun jalan yang ada dalam kondisi rusak, disamping itu pelabuhan angkut barang yang belum memadai membuat arus barang dari dan ke wilayah Penajam Paser Utara terhambat. Fasilitas

listrik dan air sebagai penunjang investasi masih kurang. Keberadaan perbankan maupun hotel dan restoran menunjukkan peningkatan.

c. Kebijakan Iklim Investasi

Terdapat potensi yang baik pada aspek Tata ruang dan perijinan, namun demikian dari analisis mendalam pada aspek tata ruang terdeteksi masalah, masih lemahnya penegakan aturan penggunaan lahan terhadap kesesuaian tata ruang.

d. Pasar

Dari pola distribusi barang dan pengeluaran pembelanjaan penduduk, terdeteksi lemahnya pasar bagi produk di wilayah Penajam Paser Utara. Namun demikian Penajam Paser Utara sebagai daerah yang sangat dekat dengan kota Balikpapan, daerah ini dapat mengambil peluang pasar Balikpapan dan sekitarnya sebagai tujuan pasar produknya.

4. Keuangan Daerah

Terdapat dua isu utama untuk keuangan daerah yakni, ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pemerintah pusat baik dana bagi hasil maupun dana alokasi. Isu kedua adalah lemahnya pengelolaan sumber penerimaan daerah baik yang berasal dari pajak, retribusi maupun dari pendapatan lain yang sah.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah dibelanjakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1). Perjanjian Kinerja Tahun 2017
- 2). Rencana Kinerja Tahun 2017
- 3). Pengukuran Kinerja Tahun 2017

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran serta bagaimana cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai dokumen resmi sudah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2017 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2017. Rencana Kinerja dalam Tahun 2017 berbentuk dokumen resmi yang disusun di awal Tahun 2017, yang merupakan Program Kerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

A. Visi dan Misi

Sesuai dengan tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan mandat, serta dengan melihat latar belakang dan mencermati isu-isu strategis yang berkembang, maka visi Kabupaten Penajam Paser Utara adalah :

VISI
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

**“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
YANG SEJAHTERA, BERKUALITAS, MANDIRI DALAM KEHIDUPAN
DAMAI, BERKEADILAN DAN AGAMIS“**

Penjabaran arti dari visi tersebut antara lain :

1. Mewujudkan masyarakat yang Sejahtera adalah: kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara telah terpenuhi secara lahir dan batin, masyarakat yang telah mencapai kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dan seluruh potensi hidup yang telah berkembang baik dipandang dari aspek materi maupun spiritual.

2. Mewujudkan masyarakat yang Berkualitas adalah: masyarakat yang memiliki mutu tinggi ditinjau dari segi pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, olah raga, seni budaya dan agama di dukung oleh tata pemerintahan yang baik.
3. Mewujudkan masyarakat yang Mandiri adalah: masyarakat yang mampu membiayai sendiri semua kebutuhan dan aktifitas yang dilakukannya, tidak bergantung pada orang lain.
4. Mewujudkan masyarakat dalam kehidupan damai adalah: masyarakat yang berada dalam suasana tanpa kekerasan, adanya harmoni, toleransi, saling menghargai dan relasi yang setara antar individu maupun komunitas yang hidup bersama untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu wilayah tertentu pula.
5. Mewujudkan masyarakat yang Berkeadilan adalah: lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, tidak berat sebelah, berpihak kepada kebenaran, menghargai hak dan kewajiban.
6. Mewujudkan masyarakat yang Agamis adalah: kehidupan masyarakat Penajam Paser Utara senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur, masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya.

Misi untuk mencapai cita-cita dalam visi di tuangkan dalam tekad Panca Karya, antara lain:

1. Meningkatkan kemampuan SDM dengan penguasaan Iptek dan Imtaq.
2. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Berdaya Guna dan berhasil Guna, Bebas dari KKN.
3. Memelihara, meningkatkan dan membangun infrastruktur daerah.
4. Memberdayakan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
5. Optimalisasi potensi SDA untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan.

B. Tujuan dan Sasaran

Dari uraian penjelasan mengenai Visi Misi Bupati terpilih, jelas terlihat bahwa Visi dan Misi itu sesungguhnya bermuara pada satu tujuan yakni kesejahteraan masyarakat Penajam Paser Utara. Tujuan yang tertuang dalam visi itu agar dapat dicapai harus dikaitkan dengan permasalahan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan analisis permasalahan daerah yang ada, untuk mengatasi permasalahan dimaksud dijabarkan kedalam 18 tujuan utama. Kedelapan belas tujuan itu harus bersinergi dengan misi Bupati terpilih. Memetakan kedelapan belas tujuan besar pembangunan dan misi Bupati, secara keseluruhan semuanya saling terkait, misalnya misi satu mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia, itu sejalan dengan tiga tujuan pembangunan yang telah dipetakan. Misi dua mengenai perbaikan tata kelola juga menjadi dasar dari ke dua tujuan yang hendak dicapai, demikian seterusnya. Untuk itu maka tabel dibawah ini menyajikan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten Penajam Paser Utara yang paling dekat satu sama lain.

Tabel II.1 Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara

Misi	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kemampuan SDM dengan penguasaan IPTEK dan Imtaq	Meningkatkan kualitas SDM Penajam Paser Utara	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia
Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, berdaya guna dan berhasil guna, bebas dari KKN	Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik dalam suasana kondusif	Terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien dan bersih KKN
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja
Memelihara, meningkatkan dan membangun infrastruktur daerah	Terciptanya Infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata	Terbangunnya Sarana dan prasarana dasar serta fasilitas pelayanan publik yang memadai

Misi	Tujuan	Sasaran
Memberdayakan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat	Meningkatnya daya beli masyarakat
		Menurunnya tingkat Pengangguran
		Menurunnya tingkat Kemiskinan
		Menurunnya indeks Gini
		Peningkatan ekonomi berbasis pertanian
Optimalisasi potensi SDA untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan	Pemanfaatan Potensi SDA yang Ramah Lingkungan	Peningkatan produksi serta pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis
		Peningkatan kualitas lingkungan dan pengelolaan bencana
		Peningkatan Ketahanan Pangan

C. Indikator Kinerja, Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah bagaimana tujuan pembangunan yang telah dicanangkan dapat dicapai. Untuk menghasilkan strategi yang tepat dan bersinergi antara masalah yang dihadapi dengan menggunakan metode analisis *Fish Bone*. Dalam analisis tersebut dipertimbangkan aspek yang mempengaruhi permasalahan utama dalam pembangunan. Metode fishbone dapat mengidentifikasi berbagai sebab potensial satu efek atau masalah, dan menganalisis masalah tersebut melalui *brainstorming*. Tabel di bawah ini menyajikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan untuk masing-masing misi.

**Tabel II.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Kabupaten Penajam Paser Utara**

Misi Pertama

Misi 1: Meningkatkan kemampuan SDM dengan penguasaan IPTEK dan Imtaq				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas SDM Penajam Paser Utara	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Peningkatan Kualitas Penyelenggara Raan Pendidikan	Pelaksanaan Program Wajib Belajar dan Peningkatan kapasitas pendidik

Misi Kedua

Misi 2: Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, berdaya guna dan berhasil guna, bebas dari KKN				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik dalam suasana kondusif	Terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien dan bersih KKN	Opini BPK Indeks Persepsi Korupsi	Pelaksanaan Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan	Peningkatan kapasitas dan manajemen sumber daya aparatur dalam Pengelolaan keuangan daerah
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Predikat akuntabilitas kinerja		

Misi Ketiga

Misi 3 : Memelihara, meningkatkan dan membangun infrastruktur daerah				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya Infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata	Terbangunnya Sarana dan prasarana dasar serta fasilitas pelayanan publik yang memadai	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	Percepatan Peningkatan dan pencapaian target Pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas publik	Peningkatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah
		Presentase gedung perkantoran yang terbangun		

Misi Keempat

Misi 4: Memberdayakan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat	Meningkatnya daya beli masyarakat	Tingkat inflasi	Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan kesehatan Dasar bagi Masyarakat Penajam Paser Utara
	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	Perluasan kesempatan kerja	Peningkatan kesempatan Kerja
	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan	Masyarakat yang berdaya	Peningkatan pemberdayaan masyarakat
	Menurunnya indeks gini	Indeks Gini	Minimalisasi ketimpangan wilayah	Peningkatan peran serta Gender dalam Pembangunan
	Peningkatan ekonomi berbasis pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP)	Kualitas petani yang berdaya saing	Pembangunan ekonomi daerah

Misi Kelima

Misi 5: Optimalisasi potensi SDA untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan					
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Pemanfaatan Potensi SDA yang Ramah Lingkungan	Peningkatan produksi serta pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis	Pertumbuhan ekonomi tanpa migas	Peningkatan Optimalisasi Penggunaan Energi Secara Efektif & Efisien	Pengembangan Sumber Energi Baru Terbarukan dan ramah lingkungan	
		Pertumbuhan ekonomi dengan migas			
		Prosentase kontribusi daya PLTMG terhadap daya PLN	Optimalisasi potensi sumur gas yang ada sebagai sumber energi listrik alternative		Meningkatkan investasi di bidang ketenagalistrikan yang bersumber dari minigas
		Rasio elektrifikasi desa/kelurahan	Memperluas jangkauan pelayanan jaringan listrik perdesaan		Meningkatkan investasi dibidang ketenagalistrikan
	Meningkatkan kualitas lingkungan dan pengelolaan bencana	Lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	Pengendalian perusakan lingkungan	
		Energi baru terbarukan	Pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan	Perlindungan Sumber Daya Alam	
	Peningkatan ketahanan pangan	Kontribusi sector pertanian dalam arti luas	Pengembangan kawasan budidaya	Peningkatan Produktivitas	

D. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

**Tabel II.3 Sasaran dan Program Pembangunan
Kabupaten Penajam Paser Utara**

Sasaran		Indikator Sasaran Kinerja		Prioritas Program Pembangunan RPJMD	
1	Meningkatnya indeks Pembangunan manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun
				2	Program pendidikan menengah
				3	Program Pendidikan Luar Biasa
				4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
				5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan
				6	Program Pendidikan non formal
				7	Program Pendidikan Anak Usia Dini
				8	Program Perencanaan Sosial Budaya
				9	Program peningkatan peran serta kepemudaan
				10	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
				11	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
				12	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
				13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga
2	Terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien dan bersih KKN	2	Opini BPK	14	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
				15	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
		3	Indek persepsi korupsi	16	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH

Sasaran		Indikator Sasaran Kinerja		Prioritas Program Pembangunan RPJMD	
				17	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas
				18	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
				19	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
				20	Program Penataan Administrasi kependudukan
				21	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
				22	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
				23	Program perbaikan system administrasi kearsipan
				24	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
				25	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
				26	Program pengembangan wawasan kebangsaan
				27	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
				28	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
				29	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
				30	Program pendidikan politik masyarakat
				31	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
				32	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat

Sasaran		Indikator Sasaran Kinerja		Prioritas Program Pembangunan RPJMD	
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	4	Predikat akuntabilitas Kinerja	33	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
				34	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
				35	Program pengelolaan data dan dokumentasi kepegawaian
				36	Program penataan sistem manajemen aparatur
				37	Program Penataan Akuntabilitas Kinerja
				38	Program Penataan dan Penguatan Organisasi
				39	Program Kerjasama Masalah Peraturan Perundang-Undangan
				40	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
4	Terbangunnya Sarana dan prasarana dasar serta fasilitas pelayanan publik yang memadai	5	Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	41	Program pembangunan infrastruktur perdesaan
				42	Program Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
				43	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
				44	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
				45	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
				46	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
				47	Program penyediaan dan pengolahan air baku
				48	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
				49	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Sasaran		Indikator Sasaran Kinerja		Prioritas Program Pembangunan RPJMD	
				50	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
				51	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
				52	Program pembangunan Turap/talud/bronjong
				53	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
				54	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
				55	Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan
				56	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan, Pengairan
				57	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
				58	Program Pengembangan Perumahan
				59	Program pengembangan lingkungan sehat
				60	Program Pengendalian Banjir
				61	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan
				62	Program peningkatan kinerja dalam pengelolaan persampahan
				63	Program pengembangan lingkungan sehat
				64	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
				65	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
				66	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Sasaran		Indikator Sasaran Kinerja		Prioritas Program Pembangunan RPJMD			
				67	Program peningkatan pelayanan angkutan		
				68	Program Pengelolaan Areal Pemakaman		
				69	Program Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
				70	Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		
				71	Program Pengembangan sistem Informasi Pertanahan		
				72	Program perencanaan pembangunan daerah		
				73	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		
		6	Persentase gedung perkantoran yang terbangun	74	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		
				75	Program Perencanaan tata ruang		
				76	Program Pemanfaatan Ruang		
				77	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar		
				78	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah		
		5	Meningkatnya daya beli masyarakat	7	Tingkat inflasi (%)	79	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
						80	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
6	Menurunnya tingkat pengangguran	8	Tingkat pengangguran (%)	81	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja		
				82	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan		
				83	Program peningkatan kesempatan kerja		
				84	Program pengembangan wilayah transmigrasi		
				85	Program transmigrasi lokal		

Sasaran		Indikator Sasaran Kinerja		Prioritas Program Pembangunan RPJMD	
7	Menurunnya tingkat kemiskinan	9	Tingkat kemiskinan (%)	86	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
				87	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
				88	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
				89	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
				90	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
				91	Program pengembangan lingkungan sehat
				92	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia
				93	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
				94	Program Pengawasan/Pengendalian Kesehatan Makanan
				95	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
				96	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
97	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				
8	Menurunnya indeks gini	10	Indeks Gini	98	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
				99	Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
				100	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
				101	Program pelayanan kontrasepsi
				102	Program Keluarga Berencana
				103	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Sasaran		Indikator Sasaran Kinerja		Prioritas Program Pembangunan RPJMD	
				104	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
				105	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
				106	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
				107	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
				108	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
				109	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
				110	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
				111	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
				112	Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
				113	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
9	Peningkatan ekonomi berbasis pertanian	11	Nilai Tukar Petani (NTP)	114	Program kerjasama pembangunan
				115	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
				116	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
				117	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
				118	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
				119	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Sasaran		Indikator Sasaran Kinerja		Prioritas Program Pembangunan RPJMD	
				120	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
				121	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha kecil Menengah
				122	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
				123	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
				124	Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
				125	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
				126	Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
				127	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
				128	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
				129	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
				130	Program Peningkatan kesejahteraan petani
				131	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
				132	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
10	Peningkatan produksi serta pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis	12	Pertumbuhan ekonomi tanpa migas	133	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
				13	Pertumbuhan ekonomi dengan migas
		135	Program pembinaan dan Perusahaan tambang yang aktif pengawasan bidang pertambangan		

Sasaran		Indikator Sasaran Kinerja		Prioritas Program Pembangunan RPJMD	
11	Meningkatkan kualitas lingkungan dan pengelolaan bencana	14	Lingkungan Hidup	136	Program pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
				137	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
		15	Energi baru terbarukan	138	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
				139	Program Rehabilitasi hutan dan lahan
				140	Program perlindungan dan kosevasi sumber daya hutan
				141	Program peningkatan kualitas dan akses sumber daya lingkungan hidup
				142	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
				143	Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan
				144	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
				145	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
				146	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
				147	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
				148	Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah
				149	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
150	Program Pengembangan Kemitraan				
12	Peningkatan Ketahanan Pangan	16	Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas (%)	151	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
				152	Program peningkatan produksi pertanian

Sasaran		Indikator Sasaran Kinerja		Prioritas Program Pembangunan RPJMD	
				153	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
				154	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
				155	Program pengembangan budidaya perikanan
				156	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
				157	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
				158	Program peningkatan kesadaran dan penegakkan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut
				159	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
				160	Program Peningkatan Kegiatan Kelautan dan wawasan Maritim Kepada Masyarakat
				161	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
				162	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
				163	Program peningkatan kapasitas aparaturn teknis petani/nelayan
				164	Program pemberdayaan penyuluh pertanian, Peternakan, perikanan, Perkebunan
				165	Program Peningkatan kesejahteraan petani
				166	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
				167	Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan/pertanian

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, telah menetapkan indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program yang akan dicapai pada Tahun 2017.

Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja. Adapun perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran**.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pengemban tugas dan amanah masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017.

Pada Bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta beberapa langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

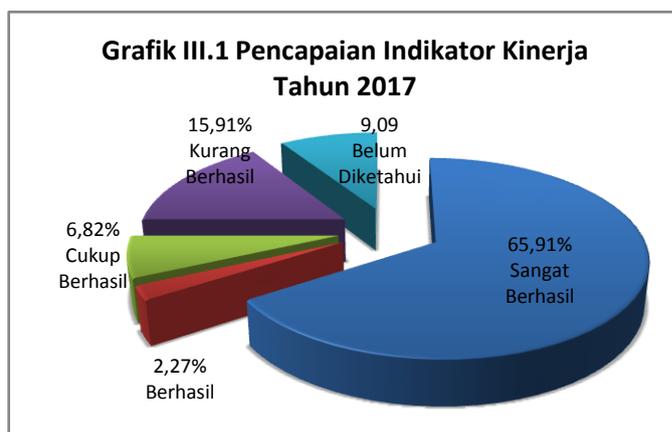
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$x > 85$	Sangat Berhasil
2	$75 < x \leq 85$	Berhasil
3	$55 < x \leq 75$	Cukup Berhasil
4	$x \leq 55$	Kurang Berhasil

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pengemban amanah masyarakat, secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018.

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017 sebanyak 8 sasaran dengan 44 indikator kinerja. Dari 44 indikator kinerja, sebanyak 29 indikator atau **65,91%** dalam kriteria **Sangat Berhasil**, bahkan 20 (dua puluh) indikator



kinerja diantaranya mencapai realisasi **lebih dari 100%**. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja atau **2,27%** masuk dalam kriteria **Berhasil**, 3 (tiga) indikator kinerja atau **6,82%** masuk dalam kriteria **Cukup Berhasil**, dan 7 (tujuh) indikator atau **15,91%** masuk dalam kriteria **Kurang Berhasil**, serta 4 (empat) indikator atau **9,09%** tidak dapat diketahui sementara karena data terkait indikator tersebut belum dapat dipublikasikan atau belum diketahui hasilnya, atau karena kegiatan yang mendukung indikator tersebut tidak dapat terlaksana.

Selengkapnya capaian indikator kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	2017		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
	Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) :			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	95 Persen	95,58	100,61
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP	77,15 Persen	83,85	108,68
2	Angka Partisipasi Murni (APM) :			
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	92,48 Persen	81,78	88,42
	Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP	74,19 Persen	67,33	90,75
3	Rasio Guru Per Siswa :			
	SD	1 : 20	1 : 17	117,65
	SMP	1 : 19	1 : 15	126,67
4	Persentase Guru yang Memenuhi Standar S1 dan Sertifikasi (S1/ D4) :			
	SD/MI	80,50 Persen	91,98	114,26
	SMP/MTs	85,60 Persen	96,77	113,05
5	Opini BPK	WTP	WTP	100

No	Indikator Kinerja	2017		
		Target	Realisasi	% Realisasi
6	Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	94.731.442.644 Rupiah	103.580.670.104,41	109,34
7	Indeks Persepsi Korupsi	5	54,19	1.083,8
8	Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda	20 Kasus	5	400
9	Predikat Akuntabilitas (Dokumen LAKIP dll)	CC	CC	100
10	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	750 Sumbangan Rumah	1.116	148,80
11	WTP Perdesaan	5 WTP	-	-
12	Panjang Jaringan Irigasi Pembangunan dan Pemeliharaan	275 Km	125,77	45,73
13	Pembangunan Jalan	406 Km	77,28	19,03
14	Pembangunan Jembatan	300 M	-	-
15	Panjang Jalan yang Terpelihara	20 Km	25,30	126,50
16	Perbaikan Jalan	10 Km	-	-
17	Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya	60 Persen	66,78	111,30
18	Penurunan Angka Kematian Balita	3 Kasus	15	20
19	Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan	3 Kasus	7	42,86
20	Angka Harapan Hidup	72,36 Tahun	70,80	97,84
21	Angka Kematian Bayi Neonatal	12 Kasus	20	60
22	Cakupan Pelayanan Desa KLB	90 Persen	-	-
23	Rasio Dokter/ Penduduk	1 : 2.821	1 : 4.307	65,50
24	Peningkatan Jumlah Ketersediaan Obat	338 Jenis	231	68,34
25	Jumlah Kesadaran ber-KB	26.058 Orang	22.036	84,57
26	Penurunan Jumlah Kejadian KDRT	60 Persen	220	27,27
27	Meningkatnya IPM	75,93 Persen	69,96	92,14
28	Peningkatan Jumlah UMKM	2.578 UMKM	3.005	116,56
29	Peningkatan Jumlah Koperasi	245 Koperasi	45	18,37
30	Peningkatan UMKM yang Mendapatkan Bantuan Modal Usaha	5 UMKM	26	520
31	Pertumbuhan Jumlah IKM	700 IKM	851	121,57
32	Meningkatnya Desa Swasembada	1 Desa	1	100
33	Jumlah Lembaga Ekonomi Perdesaan Aktif/ Berkembang	3 Lembaga	23	766,67
34	Desa Mandiri Pangan	1 Desa	1	100
35	Luas Tanaman Perkebunan Rakyat	100 Ha	100	100
36	Pengujian Kualitas Air dan Udara	5 Lokasi	19	380
37	Persentase Tertanganinya Gangguan Usaha Perkebunan	75 Persen	100	133,33
38	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	10.843,99 Ton	3.904,12	36
39	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	5.211,67 Ton	5.981	114,76
40	Rasio Penyuluh terhadap Desa	1 : 3	1 : 1	300

SASARAN 1
“Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia”

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2016		2017			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2017 Terhadap 2018 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)							
1	Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) :							
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	95,41	Persen	95	95,58	100,61	95	100,6
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP	78,70	Persen	77,15	83,85	108,68	77,15	108,7
2	Angka Partisipasi Murni (APM) :							
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	78,10	Persen	92,48	81,78	88,42	92,49	88,4
	Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP	65,26	Persen	74,19	67,33	90,75	74,19	90,8
3	Rasio Guru Per Siswa :							
	SD	1:20		1 : 20	1 : 17	117,65	1 : 19,5	114,71
	SMP	1:13		1 : 19	1 : 15	126,67	1 : 19	126,67
4	Persentase Guru yang Memenuhi Standar S1 dan Sertifikasi (S1/ D4) :							
	SD/MI	86,99	Persen	80,50	91,98	114,26	84,70	114,26
	SMP/MTs	89,20	Persen	85,60	96,77	113,05	90,50	113,05
Rata-rata Capaian Kinerja						107,51		106,31

Salah satu upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana merupakan salah satu misi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, misi 1 “Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia dengan Penguasaan IPTEK dan Imtaq” dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas pendidikan yang terjangkau dan merata.

Sasaran 1 (satu) terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 107,51 atau dikategorikan **sangat berhasil**, dan rata-rata capaian kinerja terhadap RPJMD Tahun 2018 sebesar 97,74%.

Selengkapnya masing-masing capaian kinerja pada sasaran 1 (satu) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :

1. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai jenjang. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Dalam penetapan angka ini berpedoman pada standar nasional.

Tabel III.3 Capaian APK Tahun 2014 - 2017

Indikator	Capaian			
	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Angka Partisipasi Kasar (APK) :				
a. SD	95,49	93,45	95,41	95,58
b. SLP	73,76	76,22	78,70	83,85

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD dan SLTP dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 kecenderungan mengalami peningkatan. Peningkatan capaian ini menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran masyarakat Penajam Paser Utara akan pentingnya pendidikan, dan juga didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta keberadaan sekolah yang seluruhnya hampir tersebar merata dalam jarak jangkauan dengan kawasan pemukiman penduduk.

1.a. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD

Dengan target 95%, terealisasi 95,58% berarti Capaian Kinerja dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD pada tahun 2017 telah melebihi target, sebesar 0,58 % dengan realisasi capaian sebesar 100,61% atau termasuk dalam kategori kinerja **sangat berhasil**. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2016, terjadi peningkatan sebesar 0,17% di Tahun 2017.

2.b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP

Capaian Kinerja dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP pada tahun 2017 melebihi target, sebesar 6,7% dengan realisasi capaian sebesar 108,68 % atau termasuk dalam kategori kinerja **sangat berhasil**. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2016, terjadi peningkatan

sebesar 5,15% di Tahun 2017. Indikator Kinerja ini terus mengalami kenaikan dari beberapa tahun sebelumnya.

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perhitungan dari jumlah siswa sesuai jenjang pendidikan dibanding jumlah penduduk kelompok usia sekolah sesuai jenjang pendidikan. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti pada Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD dan SLTP dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 kecenderungan mengalami peningkatan, namun tidak mencapai seperti yang ditargetkan karena seluruh anak usia sekolah belum dapat bersekolah tepat waktu dan masih ada anak yang belum memenuhi persyaratan batas usia minimum yang telah ditentukan pemerintah tetapi sudah bersekolah.

Tabel III.4 Capaian APM Tahun 2014 - 2017

Indikator	Capaian			
	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Angka Partisipasi Murni (APM)				
a. SD	77,53	78,10	78,10	81,78
b. SLTP	58,47	61,01	65,26	67,33

2.a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD

Target pada Tahun 2017 sebesar 92,48% terealisasi sebesar 81,78%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 88,42% dengan kategori **berhasil** atau bernilai kinerja sangat tinggi.

2.b. Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP

Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP menunjukkan keberhasilan dengan capaian kinerja 90,75% dalam kategori **sangat berhasil** atau bernilai kinerja sangat tinggi. Target pada Tahun 2017 sebesar 74,19% dengan realisasi 67,33%.

3. Rasio Guru Per Siswa

Capaian Indikator Kinerja Rasio Guru Per Siswa untuk jenjang SD dan SMP telah tercapai melebihi target, dengan kategori capaian **sangat berhasil**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2018, Indikator Kinerja Rasio Guru Per Siswa untuk jenjang SD dan SMP telah mencapai di atas 100%. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di setiap sekolah, dilakukan perekrutan guru honorer yang dibiayai dari Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

4. Persentase Guru yang Memenuhi Standar S1 dan Sertifikasi (S1/D4)

Indikator Sasaran Persentase Guru yang Memenuhi Standar S1 dan Sertifikasi (S1/D4) untuk jenjang pendidikan SD dan SMP tercapai dengan melebihi dari target, dan mengalami peningkatan capaian dibanding tahun 2016. Peningkatan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1 karena sebagian besar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan, sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru harus memenuhi kualifikasi akademik yaitu memiliki ijazah strata 1 atau diploma IV dan bersertifikat pendidik.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pendidikan”, yaitu :

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun
2. Program Pendidikan Menengah
3. Program Pendidikan Luar Biasa
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Program Pendidikan Non Formal
7. Program Perencanaan Sosial Budaya
8. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
9. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
10. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
11. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
12. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK)

SASARAN 2**“Terwujudnya Pemerintah yang Efektif, Efisien, dan Bebas KKN”**

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2017 Terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	100	WTP	-
2	Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	224.657.038.425,67 Rupiah	94.731.442.644	103.580.670.104,41	109,34	434.519.106.299	23,84
3	Indeks Persepsi Korupsi	5	5	54,19	1.083,8	5	1.083,8
4	Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda	10 Kasus	20	5	400	10	50
Rata-rata Capaian Kinerja					250,61		205,24

Sasaran ini merupakan dukungan misi 2 "Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, berdaya guna dan berhasil guna, bebas dari KKN". Sasaran 2 (dua) ini terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 250,61% atau dikategorikan **sangat berhasil**, dan rata-rata capaian kinerja terhadap RPJMD tahun 2018 sebesar 205,24%.

Selengkapnya masing-masing capaian kinerja pada sasaran 2 (dua) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :

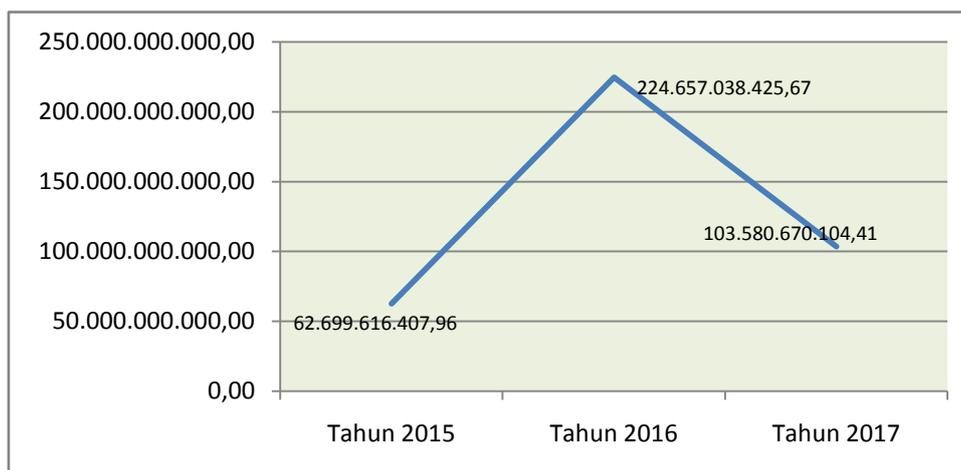
1. Opini BPK

Untuk Tahun Anggaran 2016 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian WTP ini merupakan pencapaian tahun pertama. Pencapaian ini apabila dipertahankan, sudah memenuhi target pada akhir tahun RPJMD pada tahun 2018 yaitu opini WTP. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selalu berupaya dan berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, dan transparan sehingga diharapkan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dipertahankan di tahun-tahun yang akan datang. Komitmen tersebut diperkuat dengan adanya kewajiban penandatanganan Pakta Integritas untuk setiap pejabat dan seluruh aparatur sipil negara serta efektifnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

2. Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan pada anggaran murni, dari target Rp 94.731.442.644 dan realisasinya Rp 103.580.670.104,41 atau tingkat capaiannya 109,34% dari target kinerja.

Grafik III.2 Nilai PAD Tahun 2015 - 2017



Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, data diolah

3. Indeks Persepsi Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia adalah suatu instrumen pengukuran tingkat korupsi kota-kota di seluruh Indonesia. Nilai Indeks Persepsi Korupsi Kabupaten Penajam Paser Utara diperoleh dari perhitungan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Provinsi Kalimantan Timur. Nilai Indeks Persepsi Korupsi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 adalah 54,19, mengalami peningkatan dibanding tahun 2016. Dengan target IPK 5 pada Tahun 2017 terealisasi 54,19 maka realisasi capaiannya sebesar 1.083,8%.

4. Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda

Sasaran ini merupakan dukungan misi 2 " Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, berdaya guna dan berhasil guna, bebas dari KKN". Capaian indikator Kinerja penurunan Jumlah pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) pada tahun 2017 yang ditargetkan menurun 20 kasus hasilnya terealisasi menjadi 5 kasus, sehingga tingkat capaiannya 400% atau dalam kategori **sangat**

berhasil. Jumlah pelanggaran Perda di Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2016 sebanyak 10 kasus mengalami penurunan jumlah menjadi 5 kasus, berarti dibandingkan tahun 2016 terhadap tahun 2017 telah terjadi penurunan pelanggaran sebesar 200%. Tercapainya indikator sasaran Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda ini karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan Perda. Untuk terus menekan jumlah pelanggaran Perda, sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban umum, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal ini menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja melakukan:

- a. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Peningkatan kerjasama dengan TNI/Polri
- c. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- d. Sosialisasi kepada masyarakat

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Terwujudnya Pemerintah yang Efektif, Efisien, dan Bebas KKN”, yaitu :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian KDH
4. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
9. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
10. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
11. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
12. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
13. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
14. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
15. Program Pendidikan Politik Masyarakat
16. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
17. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

SASARAN 3**“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja”**

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2017 Terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Predikat Akuntabilitas (Dokumen LAKIP dll)	CC	CC	CC	100	CC	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100		100

Predikat Akuntabilitas (Dokumen LKIP, dll)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) memberikan nilai 58,24 dengan predikat “CC” dari hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Target yang ditetapkan tahun 2016 adalah nilai CC terealisasi CC, telah tercapai 100%. Kedepan akan dilaksanakan upaya perbaikan guna meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

- a. Melakukan reviu dan perbaikan terhadap dokumen perencanaan pemerintah daerah dalam upaya pencapaian target-target jangka pendek dan menengah yang lebih berorientasi pada *outcome*.
- b. Memperbaiki dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja secara berjenjang.
- c. Menerapkan anggaran berbasis kinerja.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja”, yaitu:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
3. Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian
4. Program Penataan Sistem Manajemen Aparatur
5. Program Penataan Akuntabilitas Kinerja
6. Program Penataan dan Penguatan Organisasi

7. Program Kerjasama Masalah Peraturan Perundang-Undangan
8. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

SASARAN 4

“Terbangunnya Sarana dan Prasarana Dasar serta Fasilitas Pelayanan Publik yang Memadai”

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2017 Terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	417 Sambungan Rumah	750	1.116	148,80	750	148,8
2	WTP Perdesaan	3 WTP	5	-	-	30	-
3	Panjang Jaringan Irigasi Pembangunan dan Pemeliharaan	105,35 Km	275	125,77	45,73	715	17,59
4	Pembangunan Jalan	- Km	406	77,28	19,03	2.192	3,53
5	Pembangunan Jembatan	15 M	300	-	-	1.324	-
6	Panjang Jalan yang Terpelihara	470,74 Km	20	25,30	126,50	100	25,3
7	Perbaikan Jalan	20 Km	10	-	-	90	-
8	Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya	80 Persen	60	66,78	111,30	70	95,4
Rata-rata Capaian Kinerja					90,27		58,12

Sasaran ini merupakan dukungan misi 3 “Memelihara, Meningkatkan, dan Membangun Infrastruktur Daerah”. Sasaran 4 (empat) terdiri dari 8 (delapan) indikator kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 90,27% dan rata-rata capaian kinerja terhadap RPJMD tahun 2018 sebesar 58,12%.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara senantiasa menunjukkan komitmen dalam membangun infrastruktur daerah Penajam Paser Utara dengan mengaplikasikan berbagai ide inovasi sebagai percepatan pembangunan infrastruktur demi tersedianya pelayanan publik yang memadai.

Selengkapnya masing-masing capaian kinerja pada sasaran 4 (empat) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :

1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dihitung berdasarkan jumlah Sambungan Rumah (SR) yang telah terpasang. Pada tahun 2017 jumlah rumah tangga pengguna air bersih sebanyak 1.116 SR. Realisasi Rumah Tangga Pengguna

Air Bersih telah mencapai dari target 750 SR dengan capaian kinerja sebesar 148,80%, meningkat 167,63% dari realisasi tahun 2016. Bertambahnya jumlah penduduk berbanding lurus dengan bertambahnya permintaan sambungan rumah tangga pengguna air bersih.

Tabel III.5 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Tahun 2016		Tahun 2017	
Wilayah	Sambungan Rumah (SR)	Wilayah	Sambungan Rumah (SR)
Penajam	4.659	Penajam	5.290
Waru	340	Waru	472
Sepaku	290	Sepaku	445
Sotek	50	Sotek	238
Total	5.339	Total	6.455

Sumber :Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, data diolah

Dari data Tabel Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di atas diperoleh realisasi penambahan sambungan rumah tangga pengguna air bersih di Tahun 2017 sebanyak 1.116 SR.

2. Water Treatment Plant (WTP) Pedesaan

Pemerintah Kabupaten penajam Paser Utara berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, salah satunya dengan pembangunan *Water Treatment Plant Pedesaan*, namun karena keterbatasan anggaran sehingga program dan ini belum dapat terlaksana di Tahun 2017.

Sampai dengan Tahun 2016 *Water Treatment Plant Pedesaan* telah terbangun 3 WTP yaitu di Desa Labangka Barat, Babulu Darat dan Rintik, yang menunjukkan bahwa masih mencapai 27% dari target akhir RPJMD tahun 2018 sebanyak 30 WTP.

3. Panjang Jaringan Irigasi Pembangunan dan Pemeliharaan

Untuk Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana usaha tani untuk mendukung peningkatan produktivitas komoditas pangan diperlukan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi. Pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah melaksanakan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

sepanjang 125,77 Km dan Peningkatan Saluran Irigasi sepanjang 3,226 Km. Indikator ini tidak dapat tercapai seperti yang ditargetkan karena keterbatasan anggaran yang ada.

4. Pembangunan Jalan

Kondisi infrastruktur jalan provinsi di Kabupaten Penajam Paser Utara seluruhnya adalah aspal dengan kondisi baik, rusak sedang dan rusak berat sedangkan jalan kabupaten hingga tahun 2017 selain permukaan aspal, masih banyak juga jalan yang permukaannya kerikil dan bahkan tanah. Berdasarkan data dari Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pada Tahun 2017 indikator Pembangunan Jalan terealisasi sepanjang 77,28 Km. Indikator ini tidak tercapai seperti yang ditargetkan karena anggaran yang terbatas.

5. Pembangunan Jembatan

Tahun 2017 ditargetkan pembangunan jembatan sepanjang 300 m, namun belum dapat terlaksana karena keterbatasan anggaran. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 terlaksana pembangunan 1 (satu) jembatan sepanjang 15 m di Desa Babulu Darat, sehingga menunjukkan penurunan capaian di Tahun 2017 (0 m).

6. Panjang Jalan yang Terpelihara

Indikator Panjang Jalan yang Terpelihara menunjukkan keberhasilan dimana pada Tahun 2017 Panjang Jalan yang Terpelihara sepanjang 25,30 Km, melebihi dari target yang ditetapkan 20 Km sehingga capaian kinerjanya 126,50%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 terhadap tahun 2017, maka terjadi penurunan panjang jalan yang terpelihara.

7. Perbaikan Jalan

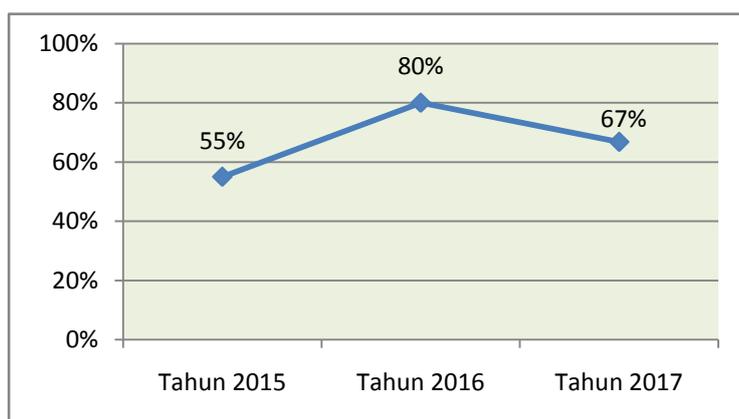
Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kegiatan perbaikan jalan di tahun 2017 tidak terlaksana (0 Km). Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran.

8. Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya

Penataan ruang sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang perlu menjadi perhatian agar pengelolaan maupun peruntukan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi teratur dan sesuai *area mapping*.

Indikator Sasaran Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya tahun 2017 ditargetkan sebesar 60% terealisasi 66,78% atau dengan capaian kinerja 111,30%. Capaian indikator ini mengalami penurunan dibandingkan pada Tahun 2016. Data indikator ini berdasarkan pada penggunaan lahan (*Land Use*) yang selalu mengalami perubahan setiap tahunnya, sehingga akan terus dilakukan *review* terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Indikator ini cenderung mengalami peningkatan dari 3 (tiga) tahun seperti terlihat pada grafik III.3 di bawah.

Grafik III.3 Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya Tahun 2014 - 2017



Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan, data diolah

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Berkembangnya Kawasan Strategis Daerah”, yaitu :

1. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
2. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
4. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
5. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
8. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
9. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
10. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
11. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
12. Program Pembangunan Sistem Informasi/ Database Jalan dan Jembatan, Pengairan
13. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan
14. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
15. Program Ruang Terbuka Hijau (RTH)
16. Program Penataan, Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
17. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
18. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
19. Program Perencanaan Tata Ruang
20. Program Pemanfaatan Ruang
21. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

SASARAN 5

“Menurunnya Tingkat Kemiskinan”

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2017 Terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Penurunan Angka Kematian Balita	13 Kasus	3	15	20	2	13
2	Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan	4 Kasus	3	7	42,86	2	28
3	Angka Harapan Hidup	72 Tahun	72,36	70,80	97,84	72,36	97,84
4	Angka Kematian Bayi Neonatal	45 Kasus	12	20	60	10	50
5	Cakupan Pelayanan Desa KLB	80 Persen	90	-	-	100	-
6	Rasio Dokter/ Penduduk	1 : 6.973	1 : 2.821	1 : 4.307	65,50	1 : 2.821	65
7	Peningkatan Jumlah Ketersediaan Obat	125 Jenis	338	231	68,34	338	68
Rata-rata Capaian Kinerja					59,09		53,64

Sasaran ini merupakan dukungan misi 4 “Memberdayakan dan Meningkatkan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat”. Sasaran 5 (lima) terdiri dari 7 (tujuh)

indikator kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 59,09% dan rata-rata capaian kinerja terhadap RPJMD tahun 2018 sebesar 53,64%.

Dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus berupaya menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Dimana pada Tahun 2017, telah memiliki sarana pelayanan kesehatan yang tersebar di 4 kecamatan, berupa 11 unit puskesmas, 45 unit puskesmas pembantu, dan 233 unit polindes serta 247 unit posyandu.

**Tabel III.6 Sarana Pelayanan Kesehatan
Tahun 2015 - 2017**

No	Sarana Pelayanan Kesehatan	Tahun 2015 (Unit)	Tahun 2016 (Unit)	Tahun 2017 (Unit)
1	Rumah Sakit Umum Daerah	1	1	1
2	Puskesmas	11	11	11
3	Puskesmas Pembantu	44	43	45
4	Polindes	26	26	33
5	Posyandu	258	265	247
Jumlah		335	346	337

Sumber : Dinas Kesehatan, Data Diolah

Selengkapnya masing-masing capaian kinerja pada sasaran 6 (enam) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :

1. Penurunan Angka Kematian Balita

Capaian Angka Kematian Balita (AKBa) pada tahun 2017 masih di bawah target, dimana target tahun 2017 sebesar 3 kasus terealisasi 15 kasus dengan realisasi capaian sebesar 20% atau dikategorikan **kurang berhasil**. Indikator penurunan angka kematian balita adalah indikator negatif yang berarti semakin tinggi realisasinya, kinerjanya semakin tidak baik. Jika dibandingkan pencapaian tahun 2016 realisasi AKBa mengalami penurunan capaian yaitu dari 13 kasus di tahun 2016 menjadi 15 kasus di tahun 2017 atau mengalami penambahan 2 kasus kematian balita. Peningkatan jumlah angka kematian balita ini tidak lepas dari kurangnya peran serta masyarakat akan pentingnya kesehatan ibu, bayi dan balita serta minimnya dukungan peran aktif tenaga kesehatan di unit pelayanan teknis. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal ini Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara dengan

meningkatkan penyuluhan serta meningkatkan konseling gizi tentang pola asuh anak dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi masyarakat.

2. Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan

Pada tahun 2017, indikator menurunnya angka kematian ibu melahirkan dengan target 3 kasus terealisasi sebanyak 7 kasus sehingga realisasi capaiannya sebesar 42,86% atau dikategorikan **kurang berhasil**. Indikator menurunnya angka kematian ibu melahirkan juga merupakan indikator negatif yang berarti semakin tinggi realisasinya, kinerjanya semakin tidak baik. Jika dibandingkan pencapaian tahun 2016 realisasi angka kematian ibu melahirkan mengalami penurunan kinerja yaitu dari 4 kasus di tahun 2016 menjadi 7 kasus di tahun 2017 atau mengalami penambahan 3 kasus kematian ibu melahirkan.

Kematian ibu melahirkan disebabkan oleh hipertensi, sesak napas, dan retensi plasenta. Hipertensi dapat terjadi karena beberapa hal seperti preeklampsia selama kehamilan, kondisi mental dan psikis ibu yang terganggu saat menghadapi persalinan, serta penyebab lainnya.

Peningkatan jumlah angka kematian ibu melahirkan ini disebabkan oleh masih minimnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan diri ke puskesmas, bidan, klink, atau rumah sakit dan juga diakibatkan oleh masih minimnya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi.

3. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Penajam Paser Utara yang merepresentasikan aspek kesehatan, Tahun 2017 mengalami penurunan. Target indikator Angka Harapan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2017 adalah 72,36 tahun, terealisasi 70,80 tahun sehingga realisasi capaiannya sebesar 97,84% atau dalam kategori **sangat berhasil**. Angka harapan hidup Penajam Paser Utara 70,80 tahun pada Tahun 2017, artinya peluang umur untuk penduduk Penajam Paser Utara yang lahir pada Tahun 2017 rata-rata 70,80 tahun. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 AHH sebesar 72 tahun, mengalami penurunan 1,20 tahun di tahun 2017 menjadi 70,80 tahun. Menunjukkan semakin menurunnya tingkat kesehatan masyarakat Penajam Paser Utara.

AHH menjadi suatu indikator peningkatan derajat kesehatan. Angka harapan hidup di Kabupaten Penajam Paser Utara cenderung meningkat beberapa tahun terakhir, namun mengalami penurunan di Tahun 2017. AHH dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor perawatan kesehatan. Keberhasilan program kesehatan pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan umur harapan hidup penduduk dari suatu daerah. Ketersediaan sarana dan prasarana perawatan kesehatan melalui rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan polindes akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Disamping tersedianya sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan umur harapan hidup tentu juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian masyarakat, kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan gizi.

4. Angka Kematian Bayi Neonatal

Angka kematian bayi neo natal di tahun 2017 dengan target 12 kasus terealisasi 20 kasus sehingga realisasi capaian sebesar 60% atau dalam kategori **cukup berhasil**. Target pada tahun 2017 memang belum tercapai 100% tetapi jika dibandingkan dengan Tahun 2016 angka kematian bayi neo natal di Tahun 2017 mengalami penurunan jumlah kasus, dimana tahun 2016 ada 45 kasus berkurang menjadi 20 kasus di tahun 2017. Penyakit yang menyebabkan bayi neonatal meninggal, diantaranya adalah kelaianan bawaan, pendarahan otak, asfiksia, dan bayi lahir prematur serta berat bayi lahir rendah.

Untuk mengurangi angka kematian bayi neo natal di Kabupaten Penajam Paser Utara, pemerintah terus berupaya dengan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan dan melakukan kegiatan berupa; penyuluhan kesehatan, jaminan persalinan, perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu.

5. Cakupan Pelayanan Desa KLB

Tahun 2017 tidak terdapat Kejadian Luar Biasa (KLB), sehingga capaian kinerjanya 0%. Hal ini sangat baik karena tidak terdapat penyakit yang dapat menyebabkan kejadian luar biasa. Adapun dasar pertimbangan penentuan desa KLB adalah SK Bupati tentang desa KLB.

6. Rasio Dokter Per Penduduk

Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Rasio dokter per penduduk pada tahun 2017 ditargetkan 1 : 2.821 terealisasi 1 : 4.307 dengan realisasi capaian sebesar 65,50% atau dalam kategori **cukup berhasil**. Realisasi capaian 65,50% menunjukkan bahwa indikator kinerja rasio dokter per penduduk masih belum mencapai seperti target yang telah ditetapkan. Capaian indikator ini telah mengalami peningkatan dibanding tahun 2016.

Salah satu penunjang keberhasilan pemerintah dalam pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan; bidan, dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, perawat dan tenaga kesehatan lainnya, serta tentunya juga didukung oleh sarana dan prasarana yang mencukupi.

Ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun tahun sebelumnya.

Tabel III.7 Rasio Tenaga Kesehatan Tahun 2016 dan Tahun 2017

No	Rasio Tenaga Kesehatan	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	13 : 100.000	11 : 100.000
2	Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	6 : 100.000	7 : 100.000
3	Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	9 : 100.000	9 : 100.000
4	Rasio apoteker per 100.000 penduduk	4 : 100.000	16 : 100.000
5	Rasio asisten apoteker per 100.000 penduduk	18 : 100.000	4 : 100.000
6	Rasio ahli gizi per 100.000 penduduk	9 : 100.000	8 : 100.000
7	Rasio bidan per 100.000 penduduk	91 : 100.000	106 : 100.000
8	Rasio perawat per 100.000 penduduk	135 : 100.000	129 : 100.000
9	Rasio ahli kesehatan masyarakat per 100.000 penduduk	23 : 100.000	14 : 100.000
10	Rasio tenaga sanitasi per 100.000 penduduk	10 : 100.000	11 : 100.000

Sumber : Dinas Kesehatan, data diolah

7. Peningkatan Jumlah Ketersediaan Obat

Ketersediaan Obat pada tahun 2017 belum mencapai target. Dengan target ketersediaan obat 338 jenis terealisasi 231 jenis, sehingga realisasi capaian sebesar 68,34% atau kategori **cukup berhasil**. Indikator Ketersediaan obat mengalami peningkatan capaian di tahun 2017 sebanyak 106 jenis dibandingkan dengan tahun 2016. Tidak tercapainya indikator ini karena pengadaan obat tidak dapat terpenuhi oleh penyedia disebabkan tidak diproduksi.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Menurunnya Tingkat Kemiskinan”, yaitu :

1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
4. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usila
8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
9. Program Pengawasan/ Pengendalian Kesehatan Makanan
10. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
11. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
12. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

SASARAN 6

“Menurunnya Indeks Gini”

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2017 Terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah Kesadaran ber-KB	24.454 Orang	26.058	22.036	84,57	26.580	83
2	Penurunan Jumlah Kejadian KDRT	385 Persen	60	220	27,27	50	44
3	Meningkatnya IPM	69,26 Persen	75,93	69,96	92,14	75,93	92,14
4	Peningkatan Jumlah UMKM	3.672 UMKM	2.578	3.005	116,56	2.630	114,26
5	Peningkatan Jumlah Koperasi	99 Koperasi	245	45	18,37	250	18

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2017 Terhadap 2018 (%)
6	Peningkatan UMKM yang Mendapatkan Bantuan Modal Usaha	3.672 UMKM	5	26	520	5	520
7	Pertumbuhan Jumlah IKM	779 IKM	700	851	121,57	705	120,71
8	Meningkatnya Desa Swasembada	1 Desa	1	1	100	2	100
9	Jumlah Lembaga Ekonomi Perdesaan Aktif/ Berkembang	10 Lembaga	3	23	766,67	15	153
10	Desa Mandiri Pangan	1 Desa	1	1	100	2	50
11	Luas Tanaman Perkebunan Rakyat	283,1 Ha	100	100	100	400	25
Rata-rata Capaian Kinerja					186,10		120,01

Sasaran ini merupakan dukungan misi 4 "Memberdayakan dan Meningkatkan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat". Sasaran 6 (enam) terdiri dari 11 (sebelas) indikator kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 193,45% dan rata-rata capaian kinerja terhadap RPJMD tahun 2018 sebesar 131,76%.

Selengkapnya masing-masing capaian kinerja pada sasaran 6 (enam) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Kesadaran ber-KB

Cakupan KB Aktif pada tahun 2017 mempunyai target 26.058 akseptor dengan realisasi 22.036 akseptor atau mencapai 84,57% atau dikategorikan **berhasil**. Capaian indikator ini mengalami penurunan jumlah cakupan KB Aktif sebanyak 2.418 akseptor jika dibandingkan dengan Tahun 2016. Penurunan diakibatkan oleh berkurangnya jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Penurunan Jumlah Kejadian KDRT

Capaian Penurunan Jumlah Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tahun 2017 masih di bawah target, dimana target tahun 2017 sebesar 60% terealisasi 220% kasus dengan realisasi capaian sebesar 27,27% atau dikategorikan **kurang berhasil**.

Indikator penurunan jumlah kejadian KDRT merupakan indikator negatif yang berarti semakin tinggi realisasinya, maka kinerjanya semakin tidak baik. Jika dibandingkan pencapaian tahun 2016 realisasi indikator ini mengalami peningkatan kinerja yaitu dari 385% di tahun 2016 menjadi 220% di tahun 2017 atau mengalami penurunan 165%. Masih tingginya jumlah kejadian KDRT di tahun

2017 salah satunya disebabkan oleh adanya kesadaran masyarakat setelah mengikuti sosialisasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) untuk melaporkan kasus KDRT, dimana di tahun-tahun sebelumnya masyarakat malu atau takut untuk melaporkan kasus KDRT. Adapun solusi yang dapat diupayakan untuk menekan jumlah kejadian KDRT adalah dengan memaksimalkan tugas dan fungsi P2TP2A.

3. Meningkatnya IPM

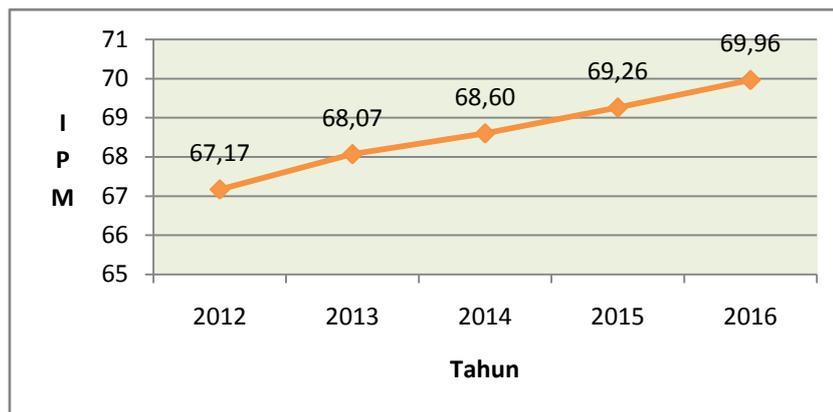
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah dengan menggunakan indeks komposit berdasarkan 3 dimensi parameter, yaitu :

- 1). Derajat kesehatan dan usia hidup (*longevity*) yang diukur dengan angka harapan hidup (*life expectancy rate*);
- 2). Derajat Pendidikan atau pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan kombinasi antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah;
- 3). Derajat Daya Beli atau Standar hidup layak (*decent living*) penduduk dilihat dari daya beli masyarakat (*purchasing power parity*), dimana dalam penghitungannya menggunakan ukuran GNP (*Gross National Product*) riil per kapita yang telah disesuaikan (*adjusted GNP real per capita*).

Pembangunan Manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara terus mengalami perbaikan, terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat dari tahun ke tahun (lihat grafik III.6). Capaian peningkatan IPM ini menunjukkan indikasi positif bahwa kualitas manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi juga semakin baik.

Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2017 belum dapat dipublikasikan karena jadwal publikasi akan dilaksanakan pada pertengahan Tahun 2018. Akan tetapi, jika melihat dari grafik III.6 di bawah ini, indeks IPM Kabupaten Penajam Paser Utara yang terus mengalami peningkatan sampai dengan Tahun 2016, diharapkan sesuai dengan yang telah diupayakan target IPM Tahun 2017 sebesar 75,93 dapat tercapai.

**Grafik III.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 - 2016**



Sumber: Badan Pusat Statistik

4. Peningkatan Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Indikator Peningkatan Jumlah UMKM tercapai dengan kategori **sangat berhasil**. Dengan target Jumlah UMKM sebanyak 2.578 UMKM di tahun 2017, terealisasi 3.005 UMKM sehingga realisasi capaian di tahun ini sebesar 116,56%. Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini didukung oleh adanya ketersediaan lahan baru untuk pembangunan pasar, perencanaan dan koordinasi yang baik oleh pihak terkait, serta antusiasme yang tinggi pengembang usaha kecil dan menengah.

5. Peningkatan Jumlah Koperasi

Tahun 2017 terjadi penurunan jumlah koperasi jika dibandingkan dengan Tahun 2016 sebanyak 54 koperasi. Penurunan ini sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi yang menyatakan bahwa lembaga koperasi yang kegiatan usahanya tidak aktif selama 2 (dua) tahun berturut-turut dapat dibubarkan atau dinon-aktifkan dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rapat Anggota Tahunan yang menyatakan bahwa lembaga yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dapat dibubarkan atau dinon-aktifkan, sehingga Tahun 2017 jumlah koperasi aktif di Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 45 koperasi.

Langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah koperasi aktif yaitu dengan mengawasi kinerja dan melakukan pembinaan setiap koperasi yang sudah terdata. Pengawasan dan pembinaan ini diharapkan agar setiap koperasi dapat menghasilkan produk unggulan daerah yang mampu bersaing secara kualitas dan kuantitas di pasaran.

6. Peningkatan UMKM yang Mendapatkan Bantuan Modal Usaha

Jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan modal usaha pada Tahun 2017 sebanyak 26 UMKM, mengalami penurunan jika dibandingkan Tahun 2016. Penurunan ini diakibatkan oleh keterbatasan anggaran yang ada. Capaian indikator ini sebesar 520% karena jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan modal usaha ditargetkan sebanyak 5 UMKM.

7. Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)

Pertumbuhan Jumlah IKM beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2017 ditargetkan 700 IKM terealisasi 851 IKM, dengan realisasi capaian sebesar 121,57% atau dalam kategori **sangat berhasil**. Jumlah IKM tahun ini bertambah sebanyak 72 IKM dari Tahun 2016. Kegiatan monitoring dan evaluasi tetap dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah IKM.

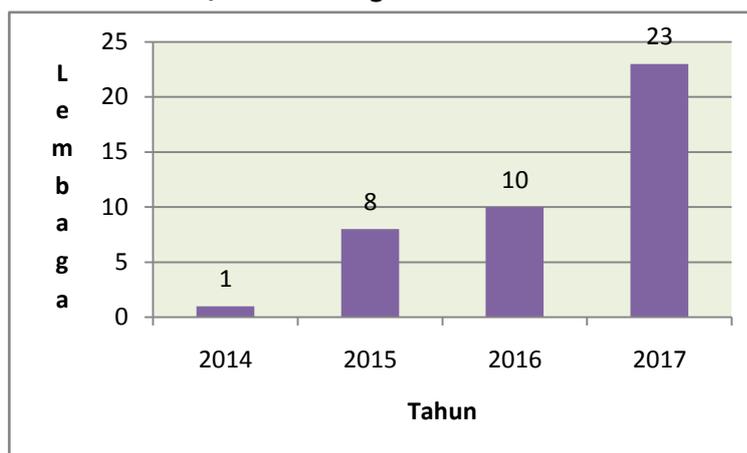
8. Meningkatnya Desa Swasembada

Tahun 2017 bertambah 1 (satu) desa swasembada yaitu Desa Bangun Mulya. Indikator kinerja Meningkatnya Desa Swasembada pada tahun 2017 tercapai sesuai dengan target 1 desa terealisasi 1 desa, sehingga realisasi capaian 100% atau dalam kategori **sangat berhasil**.

9. Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan Aktif/ Berkembang

Realisasi Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan Aktif/ Berkembang menunjukkan peningkatan dari beberapa tahun sebelumnya. Realisasi kinerja tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja ini telah melebihi target yang ditetapkan, dari target 3 lembaga, terealisasi 23 lembaga, sehingga realisasi capaian sebesar 766,67%. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang **sangat berhasil**.

Grafik III.5 Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan Aktif/ Berkembang Tahun 2014 - 2017



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, data diolah

Capaian ini didasarkan atas jumlah BUMDes yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) dan Laporan Keuangan BUMDes tahun 2016.

10. Desa Mandiri Pangan

Desa Mandiri Pangan pada Tahun 2017 bertambah 1 (satu) desa. Kegiatan ini setiap tahun dilaksanakan kepada kelompok keluarga kategori miskin (kelompok afinitas proksi) desa mandiri pangan. Target untuk indikator ini tercapai setiap tahunnya sebanyak 1 (satu) desa, sehingga capaiannya 100%.

11. Luas Tanaman Perkebunan Rakyat

Luas Tanaman Perkebunan Rakyat dapat tercapai seperti yang ditargetkan 100 Ha, terealisasi 100 Ha atau realisasi capaian sebesar 100 % dalam kategori **sangat berhasil**. Luas tanaman perkebunan rakyat 100 Ha yang berlokasi di Kecamatan Sepaku melalui kegiatan intensifikasi tanaman lada yang dananya bersumber dari APBN 2017. Namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 mengalami penurunan luas areal perkebunan rakyat di tahun 2017 karena banyaknya tanaman perkebunan (kelapa, kopi, dan karet) yang sudah tua dan yang mengalami kerusakan harus ditebang, serta kegiatan pembuatan jalan baru yang melintasi areal perkebunan sehingga menyebabkan berkurangnya luas areal perkebunan.

Tabel III.8 Luas Areal dan Jumlah Produksi Perkebunan Tahun 2016 dan Tahun 2017

No	Tanaman	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Luas Areal Perkebunan (Ha)	Jumlah Produksi Perkebunan (ton)	Luas Areal Perkebunan (Ha)	Jumlah Produksi Perkebunan (ton)
1	Kelapa Sawit	17.131	125.975,18	17.057,91	61.392,87
2	Karet	6.889,75	1.805,68	6.607,16	906,61
3	Lada	1.264,70	1.306,24	1.243,25	621,32
4	Kelapa	4.908,10	2.171,11	4.573,99	898,42
5	Kakao	15,90	3,36	12	1,6
6	Kopi	18,89	7,14	15,99	3,28

Sumber: Dinas Pertanian, data diolah

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Menurunnya Indeks Gini”, yaitu :

1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
2. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
3. Program Pelayanan Kontrasepsi
4. Program Keluarga Berencana
5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
6. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
8. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
9. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
10. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
11. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
12. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
13. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
14. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
15. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
17. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
18. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
19. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
20. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

21. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
22. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
23. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

SASARAN 7

“Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Bencana”

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2017 Terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Pengujian Kualitas Air dan Udara	10 Lokasi	5	19	380	25	92
2	Persentase Tertanganinya Gangguan Usaha Perkebunan	- Persen	75	100	133,33	400	25
Rata-rata Capaian Kinerja					256,67		58,50

Sasaran ini merupakan dukungan misi 5 "Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam (SDA) untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan". Sasaran 7 (tujuh) terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan nilai rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 2566,67% dan rata-rata capaian kinerja terhadap RPJMD tahun 2018 sebesar 58,50%.

Selengkapnya masing-masing capaian kinerja pada sasaran 7 (tujuh) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengujian Kualitas Air dan Udara

Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengujian kualitas air dan udara pada 19 (sembilan belas) titik lokasi, yang terdiri dari 10 (sepuluh) titik air sungai, 5 (lima) titik air laut dan 4 (empat) titik udara. Jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2016 terdapat peningkatan atau penambahan titik lokasi pengujian karena Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup mengalami perubahan nomenklatur sehingga mengalami peningkatan dalam pelaksanaan kegiatan pengujian kualitas air dan udara. Target yang telah ditetapkan 10 (sepuluh) lokasi di tahun 2017 dapat terealisasi mencapai 380% atau dikategorikan **sangat berhasil**. Realisasi indikator ini sampai dengan tahun 2017 telah mencapai 92% dari target akhir RPJMD tahun 2018. Kedepannya beberapa hal yang dapat

dilakukan yaitu penambahan titik lokasi pengambilan sampel, peningkatan pengawasan lingkungan hidup dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.

2. Persentase Tertanganinya Gangguan Usaha Perkebunan

Persentase Tertanganinya Gangguan Usaha Perkebunan dapat tercapai 100% dari yang ditargetkan 75%. Dari 7 (tujuh) kasus kebakaran lahan di Kecamatan Penajam dapat tertangani seluruhnya hingga 100%. Data pada Tahun 2016 tidak dapat diketahui. Capaian kinerja pada Tahun 2017 mencapai 133,33%.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Bencana”, yaitu :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
3. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Sumber Daya Lingkungan Hidup
5. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
6. Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
7. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

SASARAN 8

“Peningkatan Ketahanan Pangan”

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2017 Terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	2.445,9 Ton	10.843,99	3.904,12	36	11.386	34,29
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	6.269,6 Ton	5.211,67	5.981	114,76	5.368,02	111,42
3	Rasio Penyuluh terhadap Desa	1 : 2	1 : 3	1 : 1	300	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja					150,25		72,86

1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Indikator kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya pada tahun 2017 dengan target 10.843,99 ton terealisasi 3.904,12 ton, atau realisasi capaian sebesar 36% dikategorikan **kurang berhasil**. Jika dibandingkan dengan realisasi

tahun 2016 sebanyak 2.445,9 ton mengalami peningkatan di tahun 2017 dimana bertambah sebanyak 1.458,22 ton.

Tabel III.9 Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2017

Tahun	Produksi Perikanan Budidaya (ton)
2015	4.133,50
2016	2.445,90
2017	3.904,12

2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Indikator kinerja jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2017 dengan target 5.211,67 ton terealisasi 5.981 ton, atau realisasi capaian sebesar 114,76% dikategorikan **sangat berhasil**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebanyak 6.269,6 ton mengalami penurunan di tahun 2017 dimana berkurang sebanyak 288,6 ton.

Tabel III.10 Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2017

Tahun	Produksi Perikanan Tangkap (ton)
2015	4.991,90
2016	6.269,60
2017	5.981,00

3. Rasio Penyuluh Terhadap Desa

Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki rasio tenaga penyuluh terhadap desa 1 : 1, setiap penyuluh menangani tiga sektor yaitu pertanian, peternakan dan perkebunan. Ada beberapa desa yang ditangani lebih dari satu penyuluh karena desa tersebut dianggap kurang potensi pertaniannya atau potensi perikananannya yang menonjol. Indikator kinerja ini dapat tercapai melebihi dari yang ditargetkan, dengan realisasi capaian 300% atau dalam kategori **sangat berhasil**. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, rasio penyuluh terhadap desa mengalami peningkatan di tahun 2017 karena tenaga penyuluh di tahun 2017 mengalami penambahan.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Peningkatan Ketahanan Pangan”, yaitu :

1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
2. Program Peningkatan Produksi Pertanian
3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
4. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
5. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar
6. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
7. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
8. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan
9. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Hasil capaian kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2017 secara umum dapat mencapai target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari 8 (delapan) sasaran yang ditargetkan, tercapai dengan rentang capaian kinerja sasaran bervariasi. Rata-rata nilai capaian kinerja sasaran sebesar 150,06% dengan interpretasi "*sangat berhasil*". Perolehan rata-rata nilai kinerja tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel III.11 Perolehan Capaian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017**

Nomor Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Rata-rata Capaian Tahun 2017 (%)
1	4	107,51
2	4	250,61
3	1	100
4	8	90,27
5	7	59,09
6	11	186,10
7	2	256,67
8	3	150,25
Rata-rata Nilai Capaian Kinerja		150,06

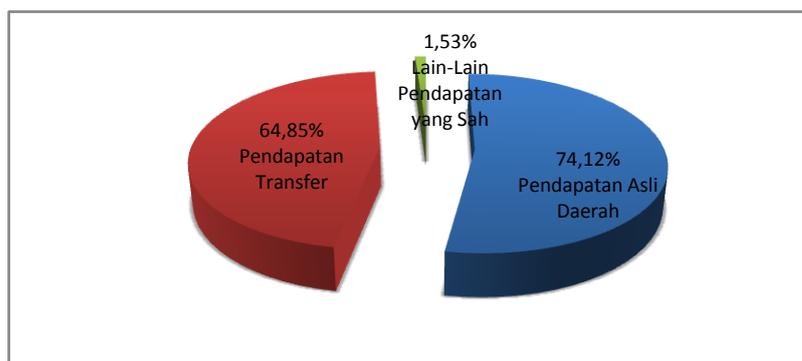
Berdasarkan data pada Tabel III.11 di atas, dari 8 (delapan) sasaran yang diukur kinerjanya pada Tahun 2017 mempunyai indikator kinerja sasaran sebanyak 44 buah indikator. Dari penjumlahan nilai capaian kinerja sasaran, diketahui jumlahnya adalah sebesar 1.200,5% atau jika dihitung nilai rata-rata dengan cara membagi jumlah capaian kinerja tersebut dengan banyaknya sasaran yang ada maka akan diperoleh rata-rata nilai capaian kinerja Tahun 2017 sebesar 150,06%.

B. REALISASI ANGGARAN

Efektivitas dan efisiensi alokasi belanja Negara dengan mengacu kepada penerapan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan sebagai berikut :

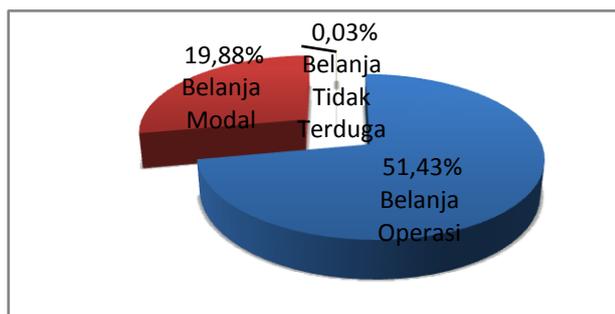
APBD Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2017 sebesar Rp 1.222.003.670.955,00 dengan rincian sebagai realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp 992.015.175.118,41 dan realisasi belanja sebesar Rp 1.012.317.865.372,63 sehingga terjadi defisit sebesar Rp 20.302.690.254,22. Sementara itu realisasi pembiayaan dari sisi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 55.808.006.636,02 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp 27.523.640.603,80. Dari realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp 992.015.175.118,41 PAD memberikan kontribusi sebesar Rp 103.580.670.104,41. Realisasi PAD ini melebihi target dari yang direncanakan sebesar Rp 94.731.442.644 atau melebihi targer sebesar 9,34%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 adalah Rp 103.580.670.104,41, jumlah ini menurun 46,11 persen dibanding PAD tahun 2016 yang sebesar Rp 224.657.038.425,67. Jika dibandingkan dengan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara, maka Realisasi PAD ini memiliki proporsi sebesar 8,48% terhadap APBD. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 21.334.778.145,88, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp 6.968.177.711,50, Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 4.957.163.549,44 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 70.320.550.697,59.

Grafik III.6 Proporsi PAD pada APBD Tahun 2017



Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Operasi sebesar Rp 672.327.350.637,63, Belanja Modal sebesar Rp 259.926.081.091,00, dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 390.000.000,00.

Grafik III.7 Proporsi Belanja pada APBD Tahun 2017



Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pada Tahun 2017 Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 55.808.006.636,02 atau meningkat 44,07% dibanding Penerimaan Pembiayaan Tahun 2016 yang sebesar Rp 24.595.210.790,23. Pada Tahun 2017 terdapat Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank, dengan jumlah Rp 7.981.675.778,00 sehingga di tahun 2017 Pembiayaan Neto Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp 47.826.330.858,02.

Rincian realisasi APBD 2017 (*unaudited*) sebagai berikut:

Tabel III.12 Laporan Realisasi APBD T.A 2017

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Unaudited)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	2016
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.222.003.670.955,00	992.015.175.118,41	81,18%	1.338.434.761.879,67
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	21.700.000.000,00	21.334.778.145,88	98,32%	168.047.799.861,33
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	6.333.204.595,00	6.968.177.711,50	110,03%	7.708.979.248,60
1.1.3	Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.040.179.924,00	4.957.163.549,44	98,35%	3.323.618.808,88
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	92.627.415.481,00	70.320.550.697,59	75,92%	45.572.413.941,86
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	125.700.800.000,00	103.580.670.104,41	82,40%	224.652.811.860,67

Nomor Urut	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	2016
1	2	3	4	5	6
1.2	PENDAPATAN TRANSFER				
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	138.615.846.039,00	78.078.444.169,00	56,33%	110.107.217.645,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	362.161.876.186,00	230.848.953.575,00	63,74%	507.815.311.825,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	255.066.428.000,00	255.066.428.000,00	100,00%	254.752.550.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	49.070.549.000,00	44.613.032.600,00	90,92%	60.401.953.000,00
1.2.1.5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	53.681.253.000,00	46.845.045.940,00	87,27%	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	858.595.952.225,00	655.451.904.284,00	76,34%	933.077.032.470,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	21.639.040.000,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	27.736.025.000,00	27.736.025.000,00	100,00%	35.507.338.299,00
1.2.2.3	Dana Insentif Daerah	43.515.911.000,00	43.515.911.000,00	100,00%	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	71.251.936.000,00	71.251.936.000,00	100,00%	57.146.378.299,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi				
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	99.516.542.000,00	95.844.224.000,00	96,31%	76.384.782.000,00
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil lainnya	-	-	-	-
1.2.3.3	Bantuan Keuangan	46.438.440.730,00	45.388.440.730,00	97,74%	47.173.757.250,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	145.954.982.730,00	141.232.664.730,00	96,76%	123.558.539.250,00
	Total Pendapatan Transfer	1.075.802.870.955,00	867.936.505.014,00	80,68%	1.113.781.950.019,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
1.3.1	Pendapatan Hibah	20.500.000.000,00	20.498.000.000,00	99,99%	-
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	20.500.000.000,00	20.498.000.000,00	99,99%	-
	Jumlah Pendapatan	1.222.003.670.955,00	992.015.175.118,41	81,18%	1.338.434.761.879,67
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI				
2.1.1	Belanja Pegawai	483.551.522.504,00	423.730.457.866,00	87,63%	540.766.209.882,00
2.1.2	Belanja Barang	278.340.949.271,00	211.719.037.837,63	76,06%	249.310.802.581,00
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	43.222.759.253,00	36.877.854.934,00	85,32%	4.701.289.966,40
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	750.000.000,00	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	805.865.231.028,00	672.327.350.637,63	83,43%	04.778.302.429,40

Nomor Urut	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	2016
1	2	3	4	5	6
2.2	BELANJA MODAL				
2.2.1	Belanja Tanah	31.036.920.983,00	20.723.557.405,00	66,77%	33.491.617.076,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	33.198.751.950,00	19.316.415.715,00	58,18%	46.511.391.051,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	579.511.952.900,00	181.474.772.431,00	31,32%	108.925.810.249,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	67.097.463.300,00	38.235.920.540,00	56,99%	218.760.155.575,48
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	175.727.000,00	175.415.000,00	99,82%	301.676.079,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-		-
	Jumlah Belanja Modal	711.020.816.133,00	259.926.081.091,00	36,56%	407.990.650.030,48
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA				591.000.000,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.634.120.332,00	390.000.000,00	14,81%	591.000.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	2.634.120.332,00	390.000.000,00	14,81%	591.000.000,00
	Jumlah Belanja	1.519.520.167.493,00	932.643.431.728,63	61,38%	1.213.359.952.459,88
3	TRANSFER	-	-		-
3.1	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	-	-		-
3.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	-		-
3.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-		-
3.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-		-
	Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa	-	-		-
3.2	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN				
3.2.1	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya				
3.2.2	Bantuan Keuangan ke Desa	96.226.790.274,00	78.937.016.810,00	82,03%	93.124.596.740,00
3.2.2	Bantuan Keuangan Lainnya	750.621.921,00	737.416.834,00	98,24%	737.416.834,00
	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan	96.977.412.195,00	79.674.433.644,00	82,16%	93.862.013.574,00
	Jumlah Transfer	96.977.412.195,00	79.674.433.644,00	82,16%	93.862.013.574,00
	Jumlah Belanja dan Transfer	1.616.497.579.688,00	1.012.317.865.372,63	62,62%	1.307.221.966.033,88
	Surplus/ (Defisit)	(394.493.908.733,00)	(20.302.690.254,22)	5,15%	31.212.795.845,79
4	PEMBIAYAAN				
4.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	403.975.584.511,00	55.808.006.636,02	13,81%	24.595.210.790,23
4.1.1	Penggunaan SiLPA	55.808.006.636,00	55.808.006.636,02	100,00%	24.595.210.790,23
4.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
4.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
4.1.4	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	-	-	-	-

Nomor Urut	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	2016
------------	--------	---------------	----------------	---	------

1	2	3	4	5	6
4.1.5	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya				
4.1.6	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank				
4.1.7	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	348.167.577.875,00	-	-	-
4.1.8	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi				
4.1.9	Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya				
4.1.10	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-
4.1.11	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah				
4.1.12	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	403.975.584.511,00	55.808.006.636,02	13,81%	24.595.210.790,23
4.2	PENGELUARAN DAERAH	9.481.675.778,00	7.981.675.778,00		-
4.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
4.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	4.500.000.000,00		-
4.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat				
4.2.4	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya				
4.2.5	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank				
4.2.6	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	3.481.675.778,00	3.481.675.778,00		
4.2.7	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi				
4.2.8	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya				
4.2.9	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara				
4.2.10	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah				
4.2.11	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	9.481.675.778,00	7.981.675.778,00		-
	Pembiayaan Neto	394.493.908.733,00	47.826.330.858,02	12,12%	24.595.210.790,23
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	27.523.640.603,80	-	55.808.006.636,02

Realisasi anggaran pada Program-Program yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja 2017 dirincikan sebagai berikut :

Tabel III.13 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program T.A 2017

No	Program	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	77.475.117.462	75.679.515.140	63.074.853.918	83,34
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	17.830.279.442	16.851.318.549	14.064.275.589	83,46
3	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK)	138.600.000	138.600.000	138.600.000	100,00
4	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun	91.219.403.749	91.033.807.559	77.080.584.597,63	84,67
5	Program Pendidikan Menengah	939.318.000	3.263.101.706	2.913.911.733	89,30
6	Program Pendidikan Non Formal	41.270.000	41.270.000	21.819.800	52,87
7	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8.181.587.000	9.628.492.200	7.215.592.200	74,94
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	760.020.000	770.712.000	684.987.472	88,88
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.107.125.100	2.880.823.000	2.312.915.930	80,29
10	Program peningkatan Kualitas SDM Aparatur	20.000.000	19.840.000	19.735.000	99,47
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	672.795.500	719.456.028	550.970.858	76,58
12	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	6.462.031.115	6.462.031.052	3.955.881.269	61,22
13	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3.656.699.850	3.603.020.792	1.076.580.300	29,88
14	Program Pengawasan Obat dan Makanan	15.006.100	15.006.100	6.700.000	44,65
15	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	657.010.000	657.010.000	214.176.000	32,60
16	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	390.073.500	390.073.499	220.504.700	56,53
17	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	481.744.800	491.744.625	152.692.809	31,05
18	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2.118.252.049	2.090.581.477	853.741.350	40,84
19	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	227.734.300	182.699.000	98.177.280	53,74
20	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	32.648.771.272	32.634.714.772	26.556.477.691	81,37
21	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	213.494.599	213.494.599	75.000.000	35,13
22	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	11.692.260.000	9.509.150.000	2.129.564.800	22,39
23	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	9.000.000.000	9.000.000.000	7.325.101.800	81,39
24	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	349.670.000	349.669.820	151.375.500	43,29
25	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	159.298.000	159.297.744	42.699.000	26,80
26	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	529.235.000	529.235.000	142.117.800	26,85

No	Program	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
27	Program Keluarga Berencana	1.145.184.000	1.083.861.375	492.383.375	45,43
28	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	280.930.000	280.930.000	132.605.000	47,20
29	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	25.000.000.000	25.000.000.000	25.144.757.866	100,58
30	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	436.921.147.005	451.755.854.550	83.657.096.310	18,52
31	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	6.974.780.000	6.631.131.000	2.371.781.142	35,77
32	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	5.007.706.972	3.660.734.472	2.387.102.599	65,21
33	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	12.431.950.000	12.002.950.000	9.246.247.010	77,03
34	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	1.205.010.000	1.000.000.000	958.059.493	95,81
35	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	6.336.793.900	6.186.793.900	2.291.980.500	37,05
36	Program Pengendalian Banjir	1.432.940.000	1.128.940.000	636.326.899	56,36
37	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	46.185.196.400	43.909.134.300	33.062.743.983	75,30
38	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	5.808.000.000	4.158.000.000	3.914.933.000	94,15
39	Program Perencanaan Tata Ruang	1.779.760.000	1.545.485.000	163.163.724	10,56
40	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	13.953.871.289	12.776.788.289	8.839.792.794	69,19
41	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana	469.400.000	417.083.400	300.205.996	71,98
42	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	200.000.000	200.000.000	30.191.900	15,10
43	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	357.305.000	166.700.000	106.494.972	63,88
44	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	7.142.982.279	6.320.102.279	-	-
45	Program Pengembangan Data/ Informasi	912.704.000	853.254.000	364.118.698	42,67
46	Penerangan Jalan Umum (PJU)	7.200.000.000	6.981.051.000	4.006.543.816	57,39
47	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	41.530.746.063	30.264.696.743	19.479.685.644	64,36
48	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	2.489.132.000	2.469.132.000	2.469.132.000	100,00
49	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor/Fasilitas Umum	1.410.112.000	2.342.246.000	1.055.553.281	45,07
50	Program Lingkungan Sehat Perumahan	464.000.000	315.844.000	221.344.708	70,08
51	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	275.222.000	275.787.000	265.477.081	96,26
52	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.395.477.000	3.635.237.000	3.162.043.639	86,98
53	Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	278.550.000	245.000.000	199.293.931	81,34
54	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	1.358.228.000	805.027.500	193.725.806	24,06

No	Program	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
55	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	681.115.000	1.095.402.200	1.048.420.700	95,71
56	Program Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran	497.940.000	497.940.000	2.200.000	0,44
57	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Penyelamatan	395.500.000	327.700.000	293.374.800	89,53
58	Program Pemanfaatan Ruang	57.600.000	92.080.000	7.469.200	8,11
59	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.187.399.000	9.988.919.148	8.474.427.328	84,84
60	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	56.900.000	84.230.000	46.575.333	55,30
61	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.054.528.818	2.628.188.518	2.118.939.932	80,62
62	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.821.550.000	1.699.852.220	1.045.598.124	61,51
63	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	348.740.000	348.740.000	298.720.345	85,66
64	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	43.515.911.000	43.540.911.000	41.492.066.540	95,29
65	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	395.000.000	389.199.000	251.199.000	64,54
66	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	417.190.000	417.190.000	231.428.200	55,47
67	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	320.330.000	281.762.600	277.870.100	98,62
68	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	7.098.687.000	7.127.387.000	5.457.806.523	76,58
69	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	660.305.000	645.402.400	583.534.800	90,41
70	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	183.565.081	181.565.081	151.907.866	83,67
71	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	10.500.000	10.500.000	7.625.727	72,63
72	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.075.194.000	2.089.138.000	1.865.647.520	89,30
73	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	150.000.000	186.900.000	175.884.367	94,11
74	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	89.645.000	75.770.000	64.679.870	85,36
75	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	146.765.000	67.624.050	55.680.745	82,34
76	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	139.773.000	130.974.921	38.143.921	29,12
77	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	129.140.000	129.140.000	129.087.000	99,96
78	Program Pemberdayaan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	149.945.000	261.875.000	253.850.102	96,94
79	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	26.700.000	26.700.000	25.726.000	96,35
80	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	47.650.000	107.250.000	97.879.200	91,26
81	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	68.650.000	68.650.000	63.449.127	92,42
82	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	91.750.000	91.750.000	65.995.100	71,93
83	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	31.680.000	31.680.000	31.655.000	99,92

No	Program	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
84	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	39.880.000	39.880.000	39.141.000	98,15
85	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	203.890.000	203.890.000	123.084.200	60,37
86	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	4.120.380.000	4.142.780.000	3.926.428.127	94,78
87	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	31.680.000	31.680.000	31.675.000	99,98
88	Program Penataan Struktur Industri	56.880.000	56.880.000	45.144.670	79,37
89	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	423.220.000	408.220.000	332.324.326	81,41
90	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	570.550.000	583.110.000	555.243.500	95,22
91	Program Pengembangan Nilai Budaya	364.662.000	364.662.000	313.642.850	86,01
92	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	20.000.000	90.000.000	89.201.400	99,11
93	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	149.870.000	195.338.000	166.707.000	85,34
94	Program Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	374.500.000	389.500.000	334.843.080	85,97
95	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	117.310.000	167.310.000	111.169.200	66,45
96	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	56.583.000	56.583.000	51.607.000	91,21
97	Program Pembinaan dan Pendidikan Politik	100.510.000	131.800.000	120.170.795	91,18
98	Program Ketahanan Sosial Ekonomi	78.390.000	78.390.000	67.624.200	86,27
99	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.450.420.000	1.330.792.260	1.292.859.600	97,15
100	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	432.010.000	326.964.500	247.427.150	75,67
101	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	711.837.000	660.774.500	319.110.086	48,29
102	Program Rekonsiliasi dan Rehabilitasi Pasca Bencana	460.585.000	19.320.543.000	589.442.513	3,05
103	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	132.862.000	88.592.800	61.237.600	69,12
104	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	541.660.000	458.660.000	427.811.027	93,27
105	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	6.531.965.000	4.718.577.800	2.612.455.306	55,37
106	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.469.655.000	1.533.855.000	1.279.879.069	83,44
107	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	276.896.400	271.310.400	134.616.400	49,62
108	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2.663.686.500	2.538.106.500	1.879.049.324	74,03
109	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	323.394.168	1.169.032.368	187.567.990	16,04
110	Program Pembangunan Daerah	1.215.851.000	1.176.421.000	775.190.950	65,89
111	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	11.712.957.250	11.226.309.750	4.144.319.940	36,92
112	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.471.390.000	2.368.470.000	1.991.117.617	84,07
113	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Umum	73.570.000	76.570.000	53.330.000	69,65

No	Program	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
114	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	460.819.700	386.819.700	358.419.563	92,66
115	Program Penanganan Bidang Hukum	1.294.126.000	1.244.126.000	998.963.785	80,29
116	Program Kerja Sama Pembangunan	130.415.000	120.357.500	68.640.500	57,03
117	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	499.227.500	520.077.500	238.754.100	45,91
118	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	338.000.000	153.000.000	124.305.000	81,25
119	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	10.349.970.000	10.557.340.000	8.927.103.199	84,56
120	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	3.476.851.820	3.455.965.920	2.869.832.298	83,04
121	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	20.595.459.500	21.984.940.100	19.699.715.581	89,61
122	Program Kerjasama Masalah Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000	564.397.900	472.531.500	83,72
123	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	339.705.000	389.755.000	347.034.000	89,04
124	Program Pembangunan Data/Informasi	134.725.000	144.825.000	143.352.170	98,98
125	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	150.000.000	150.000.000	133.134.595	88,76
126	Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan	29.400.000	29.400.000	27.774.370	94,47
127	Program Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	19.362.501.831	19.314.863.781	13.155.848.240	68,11
128	Program Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan	1.149.020.000	924.365.398	886.667.028	95,92
129	Program Pembinaan Keagamaan	404.810.550	390.117.600	386.778.600	99,14
130	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	882.488.000	1.037.940.000	805.650.410	77,62
131	Program Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa / Kelurahan	20.150.000	20.150.000	20.147.600	99,99
132	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	15.750.000	15.750.000	15.750.000	100,00
133	Program Peringatan Hari-hari Besar/Daerah/Lomba	396.650.000	322.750.000	317.465.100	98,36
134	Program Pembangunan Rumah Bagi Keluarga Miskin	50.000.000	50.000.000	49.873.440	99,75
135	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	183.050.000	235.790.000	233.036.050	98,83
136	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	241.890.000	241.890.000	-	-
137	Program Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Usaha KORPRI	329.000.000	199.000.000	-	-
138	Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian	435.080.000	584.240.000	563.140.850	96,39
139	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	50.715.000	50.715.154	48.215.000	95,07
140	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	3.659.313.000	3.367.309.096	3.197.197.380	94,95
141	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	243.285.000	243.285.000	173.369.768	71,26
142	Program Perencanaan Sosial Budaya	21.260.000	-	-	-
143	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	112.434.500	106.410.200	104.485.000	98,19
144	Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa	630.000.000	693.400.000	584.058.000	84,23

No	Program	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
145	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.273.500.500	1.262.400.500	1.111.204.400	88,02
146	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	788.085.000	465.085.000	312.304.200	67,15
147	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	167.590.000	160.890.000	69.567.682	43,24
148	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	109.880.000	109.280.000	97.468.000	89,19
149	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	246.875.000	77.900.000	25.774.300	33,09
150	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	294.286.000	302.786.000	276.730.306	91,39
151	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	885.970.650	888.531.650	743.226.455	83,65
152	Program Pengembangan Usaha Tani	92.210.000	42.014.000	23.321.400	55,51
153	Program Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Perkebunan	1.244.075.000	1.194.075.000	1.011.721.095	84,73
154	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	475.000.000	219.012.000	180.066.716	82,22
155	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1.606.350.000	1.562.043.500	1.191.347.126	76,27
156	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	894.500.000	837.500.000	185.746.400	22,18
157	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar	118.600.000	75.000.000	65.636.704	87,52
158	Program Pengembangan Perikanan dan Kelautan	1.380.500.000	1.380.500.000	1.367.053.950	99,03
159	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	-	19.900.000	16.476.450	82,80
160	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	53.710.350	53.710.350	100,00
Jumlah Anggaran		1.087.024.141.514	1.096.705.461.335	564.874.684.614,63	51,51

BAB IV PENUTUP

Pengukuran kinerja organisasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi.

Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten terutama untuk sasaran yang direncanakan dan dilaksanakan pada Tahun 2017 umumnya menggambarkan kinerja yang baik/ optimal. Dari 8 (delapan) sasaran strategis yang ditetapkan hampir seluruhnya berhasil dicapai dengan baik namun masih ada beberapa indikator kinerja sasaran yang capaiannya belum optimal.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 masih terdapat beberapa kendala dan keterbatasan, antara lain :

1. LKIP unit-unit instansi/OPD belum seluruhnya selesai tepat waktu, sehingga pengumpulan datanya terhambat, hal ini menjadi kendala dalam proses analisa penyusunan LKIP Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Belum optimalnya evaluasi kinerja internal yang dilakukan pimpinan OPD sehingga pantauan capaian kinerja dan *problem solving* terhadap kendala yang ada belum tepat waktu.
3. Target yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja mengalami perubahan, jadi dalam menghitung realisasi mengalami kesulitan karena tidak sesuai dengan indikatornya.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi tersebut akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh OPD pada setiap kesempatan tentang pentingnya Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu dan akurasi data yang dihimpun.

2. Menekankan kewajiban penyampaian laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan secara reguler, serta evaluasi kinerja dari masing-masing urusan yang menjadi kewenangannya; terutama yang berhubungan dengan indikator kinerja utama yang menjadi target RPJMD.
3. Selalu mengupayakan dan memegang teguh perencanaan yang telah dibuat sebagai dasar pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan terutama terhadap target-target yang telah ditetapkan.

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ini mampu dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta dapat digunakan sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, yang tentunya tak mungkin berhasil tanpa adanya perbaikan-perbaikan di berbagai sektor sebagaimana dijelaskan di atas.

LAMPIRAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Yusran Aspar, M.Si
Jabatan : Bupati Penajam Paser Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Penajam, Januari 2017
Bupati Penajam Paser Utara




Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(3)
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
		APK:	
		SD	95 Persen
		SLTP	77,15 Persen
		APM:	
		SD	92,48 Persen
		SLTP	74,19 Persen
		Rasio Siswa/ Guru	
		SD	1 : 20
		SMP	1 : 19
		Persentase Guru yang Memenuhi Standar S1 dan Sertifikasi (S1/ D4)	
		SD/ MI	80,50 Persen
		SMP/ MTs	85,60 Persen
2	Terwujudnya Pemerintah yang efektif, efisien dan bersih KKN	Opini BPK	WTP
		Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	94.731.442.644 Rupiah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
		Indeks Persepsi Korupsi	5
		Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda	20 Kasus
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas (Dokumen LAKIP dll)	CC
4	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Dasar serta Fasilitas Pelayanan Publik yang memadai	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	750 Sambungan Rumah
		WTP Perdesaan	5 WTP
		Panjang Jaringan Irigasi Pembangunan dan Pemeliharaan	275 Km
		Pembangunan Jalan	406 Km
		Pembangunan Jembatan	300 m
		Panjang Jalan yang Terpelihara	20 Km
		Perbaikan Jalan	10 Km
		Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya	60 Persen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
5	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Penurunan Angka Kematian Balita	3 Kasus
		Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan	3 Kasus
		Angka Harapan Hidup	72,36 Tahun
		Angka Kematian Bayi Neonatal	12 Kasus
		Cakupan Pelayanan Desa KLB	90 Persen
		Rasio Dokter/ Penduduk	1 : 2.821
		Peningkatan Jumlah Ketersediaan Obat	338 Jenis
6	Menurunnya Indeks Gini	Jumlah Kesadaran ber-KB	26.058 Orang
		Penurunan Jumlah Kejadian KDRT	60 Persen
		Meningkatnya IPM	75,93 Persen
		Peningkatan Jumlah UMKM	2.578 UMKM
		Peningkatan Jumlah Koperasi	245 Koperasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
		Peningkatan UMKM yang Mendapatkan Bantuan Modal Usaha	5 UMKM
		Pertumbuhan Jumlah IKM	700 IKM
		Meningkatnya Desa Swasembada	1 Desa
		Jumlah Lembaga Ekonomi Perdesaan Aktif/ Berkembang	3 Lembaga
		Desa Mandiri Pangan	1 Desa
		Luas Tanaman Perkebunan Rakyat	100 Ha
7	Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Bencana	Pengujian Kualitas Air dan Udara	5 Lokasi
		Persentase Tertanganinya Gangguan Usaha Perkebunan	75 Persen
8	Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	10.843,99 Ton
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	5.211,67 Ton
		Rasio Penyuluh terhadap Desa	1 : 3

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	77.475.117.462
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	17.830.279.442
3	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK)	138.600.000
4	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun	91.219.403.749
5	Program Pendidikan Menengah	939.318.000
6	Program Pendidikan Non Formal	41.270.000
7	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8.181.587.000
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	760.020.000
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.107.125.100
10	Program peningkatan Kualitas SDM Aparatur	20.000.000
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	672.795.500
12	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	6.462.031.115
13	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3.656.699.850
14	Program Pengawasan Obat dan Makanan	15.006.100
15	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	657.010.000
16	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	390.073.500
17	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	481.744.800
18	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2.118.252.049
19	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	227.734.300
20	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	32.648.771.272
21	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	213.494.599

No	Program	Anggaran (Rp)
22	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	11.692.260.000
23	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	9.000.000.000
24	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	349.670.000
25	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	159.298.000
26	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	529.235.000
27	Program Keluarga Berencana	1.145.184.000
28	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	280.930.000
29	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	25.000.000.000
30	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	436.921.147.005
31	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	6.974.780.000
32	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	5.007.706.972
33	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	12.431.950.000
34	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	1.205.010.000
35	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	6.336.793.900
36	Program Pengendalian Banjir	1.432.940.000
37	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	46.185.196.400
38	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	5.808.000.000
39	Program Perencanaan Tata Ruang	1.779.760.000
40	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	13.953.871.289
41	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana	469.400.000
42	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	200.000.000

No	Program	Anggaran (Rp)
43	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	357.305.000
44	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	7.142.982.279
45	Program Pengembangan Data/ Informasi	912.704.000
46	Penerangan Jalan Umum (PJU)	7.200.000.000
47	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	41.530.746.063
48	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	2.489.132.000
49	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor/Fasilitas Umum	1.410.112.000
50	Program Lingkungan Sehat Perumahan	464.000.000
51	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	275.222.000
52	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.395.477.000
53	Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	278.550.000
54	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	1.358.228.000
55	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	681.115.000
56	Program Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran	497.940.000
57	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Penyelamatan	395.500.000
58	Program Pemanfaatan Ruang	57.600.000
59	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.187.399.000
60	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	56.900.000
61	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.054.528.818
62	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.821.550.000
63	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	348.740.000

No	Program	Anggaran (Rp)
64	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	43.515.911.000
65	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	395.000.000
66	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	417.190.000
67	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	320.330.000
68	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	7.098.687.000
69	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	660.305.000
70	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	183.565.081
71	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	10.500.000
72	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.075.194.000
73	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	150.000.000
74	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	89.645.000
75	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	146.765.000
76	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	139.773.000
77	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	129.140.000
78	Program Pemberdayaan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	149.945.000
79	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	26.700.000
80	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	47.650.000
81	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	68.650.000
82	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	91.750.000
83	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	31.680.000
84	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	39.880.000

No	Program	Anggaran (Rp)
85	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	203.890.000
86	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	4.120.380.000
87	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	31.680.000
88	Program Penataan Struktur Industri	56.880.000
89	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	423.220.000
90	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	570.550.000
91	Program Pengembangan Nilai Budaya	364.662.000
92	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	20.000.000
93	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	149.870.000
94	Program Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	374.500.000
95	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	117.310.000
96	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	56.583.000
97	Program Pembinaan dan Pendidikan Politik	100.510.000
98	Program Ketahanan Sosial Ekonomi	78.390.000
99	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.450.420.000
100	Program Pencegahan Dini DAN Penanggulangan Korban Bencana Alam	432.010.000
101	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	711.837.000
102	Program Rekonsiliasi dan Rehabilitasi Pasca Bencana	460.585.000
103	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	132.862.000
104	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	541.660.000
105	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	6.531.965.000

No	Program	Anggaran (Rp)
106	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.469.655.000
107	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	276.896.400
108	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2.663.686.500
109	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	323.394.168
110	Program Pembangunan Daerah	1.215.851.000
111	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	11.712.957.250
112	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.471.390.000
113	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Umum	73.570.000
114	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	460.819.700
115	Program Penanganan Bidang Hukum	1.294.126.000
116	Program Kerja Sama Pembangunan	130.415.000
117	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	499.227.500
118	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	338.000.000
119	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	10.349.970.000
120	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	3.476.851.820
121	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	20.595.459.500
122	Program Kerjasama Masalah Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000
123	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	339.705.000
124	Program Pembangunan Data/Informasi	134.725.000
125	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	150.000.000
126	Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan	29.400.000

No	Program	Anggaran (Rp)
127	Program Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	19.362.501.831
128	Program Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kecamatan	1.149.020.000
129	Program Pembinaan Keagamaan	404.810.550
130	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	882.488.000
131	Program Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa / Kelurahan	20.150.000
132	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	15.750.000
133	Program Peringatan Hari-hari Besar/Daerah/Lomba	396.650.000
134	Program Pembangunan Rumah Bagi Keluarga Miskin	50.000.000
135	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	183.050.000
136	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	241.890.000
137	Program Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Usaha KORPRI	329.000.000
138	Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian	435.080.000
139	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	50.715.000
140	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	3.659.313.000
141	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	243.285.000
142	Program Perencanaan Sosial Budaya	21.260.000
143	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	112.434.500
144	Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa	630.000.000
145	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.273.500.500
146	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	788.085.000
147	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	167.590.000

No	Program	Anggaran (Rp)
148	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	109.880.000
149	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	246.875.000
150	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	294.286.000
151	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	885.970.650
152	Program Pengembangan Usaha Tani	92.210.000
153	Program Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Perkebunan	1.244.075.000
154	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	475.000.000
155	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1.606.350.000
156	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	894.500.000
157	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar	118.600.000
158	Program Pengembangan Perikanan dan Kelautan	1.380.500.000
Jumlah Anggaran		1.087.024.141.514



Penajam, Januari 2017
Bupati Penajam Paser Utara

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

PENGUKURAN KINERJA TINGKAT PEMERINTAH

KABUPATEN : PENAJAM PASER UTARA
TAHUN : 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
		APK:					
		SD	95	Persen	95,58	Persen	100,61
		SLTP	77,15	Persen	83,85	Persen	108,68
		APM:					
		SD	92,48	Persen	81,78	Persen	88,42
		SLTP	74,19	Persen	67,33	Persen	90,75
		Rasio Guru/ Siswa					
		SD	1 : 20		1 : 17		117,65
		SMP	1 : 19		1 : 15		126,67
		Persentase Guru yang Memenuhi Standar S1 dan Sertifikasi (S1/ D4)					
		SD/ MI	80,50	Persen	91,98	Persen	114,26
		SMP/ MTs	85,60	Persen	96,77	Persen	113,05

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Terwujudnya Pemerintah yang efektif, efisien dan bersih KKN	Opini BPK	WTP	WTP	100
		Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	94.731.442.644 Rupiah	103.580.670.104,41 Rupiah	109,34
		Indeks Persepsi Korupsi	5	54,19	
		Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda	20 Kasus	5 Kasus	400
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas (Dokumen LAKIP dll)	CC	CC	100
4	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Dasar serta Fasilitas Pelayanan Publik yang memadai	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	750 Sambungan Rumah	1.116 Sambungan Rumah	148,80
		WTP Perdesaan	5 WTP	- WTP	-
		Panjang Jaringan Irigasi Pembangunan dan Pemeliharaan	275 Km	125,77 Km	45,73
		Pembangunan Jalan	406 Km	77,28 Km	19,03
		Pembangunan Jembatan	300 M	- M	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Panjang Jalan yang Terpelihara	20 Km	25,30 Km	126,50
		Perbaikan Jalan	10 Km	- Km	-
		Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya	60 Persen	66,78 Persen	111,30
5	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Penurunan Angka Kematian Balita	3 Kasus	15 Kasus	20
		Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan	3 Kasus	7 Kasus	42,86
		Angka Harapan Hidup	72,36 Tahun	70,80 Tahun	97,84
		Angka Kematian Bayi Neonatal	12 Kasus	20 Kasus	60
		Cakupan Pelayanan Desa KLB	90 Persen	- Persen	-
		Rasio Dokter/ Penduduk	1 : 2.821	1 : 4.307	65,50
		Peningkatan Jumlah Ketersediaan Obat	338 Jenis	231 Jenis	68,34
6	Menurunnya Indeks Gini	Jumlah Kesadaran ber-KB	26.058 Orang	22.036 Orang	84,57

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Penurunan Jumlah Kejadian KDRT	60 Persen	220 Persen	27,27
		Meningkatnya IPM	75,93 Persen	69,96 Persen	92,14
		Peningkatan Jumlah UMKM	2.578 UMKM	3.005 UMKM	116,56
		Peningkatan Jumlah Koperasi	245 Koperasi	45 Koperasi	18,37
		Peningkatan UMKM yang Mendapatkan Bantuan Modal Usaha	5 UMKM	26 UMKM	520
		Pertumbuhan Jumlah IKM	700 IKM	851 IKM	121,57
		Meningkatnya Desa Swasembada	1 Desa	1 Desa	100
		Jumlah Lembaga Ekonomi Perdesaan Aktif/ Berkembang	3 Lembaga	23 Lembaga	766,67
		Desa Mandiri Pangan	1 Desa	1 Desa	100
		Luas Tanaman Perkebunan Rakyat	100 Ha	100 Ha	100
7	Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Bencana	Pengujian Kualitas Air dan Udara	5 Lokasi	19 Lokasi	380

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Tertanganinya Gangguan Usaha Perkebunan	75 Persen	100 Persen	133,33
8	Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	10.843,99 Ton	3.904,12 Ton	36
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	5.211,67 Ton	5.981 Ton	114,76
		Rasio Penyuluh terhadap Desa	1 : 3	1 : 1	300

Jumlah Anggaran Tahun 2017 : Rp 1.616.497.579.688,00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2017 : Rp 1.012.317.865.372,63

RENCANA KINERJA TAHUNAN

KABUPATEN : PENAJAM PASER UTARA
TAHUN : 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
		APK:	
		SD	95 Persen
		SLTP	77,15 Persen
		APM:	
		SD	92,48 Persen
		SLTP	74,19 Persen
		Rasio Guru/ Siswa	
		SD	1 : 20
		SMP	1 : 19
		Persentase Guru yang Memenuhi Standar S1 dan Sertifikasi (S1/ D4)	
		SD/ MI	80,50 Persen
		SMP/ MTs	85,60 Persen
2	Terwujudnya Pemerintah yang efektif, efisien dan bersih KKN	Opini BPK	WTP
		Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	94.731.442.644 Rupiah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
		Indeks Persepsi Korupsi	5
		Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda	20 Kasus
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas (Dokumen LAKIP dll)	CC
4	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Dasar serta Fasilitas Pelayanan Publik yang memadai	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	750 Sambungan Rumah
		WTP Perdesaan	5 WTP
		Panjang Jaringan Irigasi Pembangunan dan Pemeliharaan	275 Km
		Pembangunan Jalan	406 Km
		Pembangunan Jembatan	300 M
		Panjang Jalan yang Terpelihara	20 Km
		Perbaikan Jalan	10 Km
		Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya	60 Persen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
5	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Penurunan Angka Kematian Balita	3 Kasus
		Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan	3 Kasus
		Angka Harapan Hidup	72,36 Tahun
		Angka Kematian Bayi Neonatal	12 Kasus
		Cakupan Pelayanan Desa KLB	90 Persen
		Rasio Dokter/ Penduduk	1 : 2.821
		Peningkatan Jumlah Ketersediaan Obat	338 Jenis
6	Menurunnya Indeks Gini	Jumlah Kesadaran ber-KB	26.058 Orang
		Penurunan Jumlah Kejadian KDRT	60 Persen
		Meningkatnya IPM	75,93 Persen
		Peningkatan Jumlah UMKM	2.578 UMKM
		Peningkatan Jumlah Koperasi	245 Koperasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
		Peningkatan UMKM yang Mendapatkan Bantuan Modal Usaha	5 UMKM
		Pertumbuhan Jumlah IKM	700 IKM
		Meningkatnya Desa Swasembada	1 Desa
		Jumlah Lembaga Ekonomi Perdesaan Aktif/ Berkembang	3 Lembaga
		Desa Mandiri Pangan	1 Desa
		Luas Tanaman Perkebunan Rakyat	100 Ha
7	Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Bencana	Pengujian Kualitas Air dan Udara	5 Lokasi
		Persentase Tertanganinya Gangguan Usaha Perkebunan	75 Persen
8	Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	10.843,99 Ton
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	5.211,67 Ton
		Rasio Penyuluh terhadap Desa	1 : 3